Rita Sukma Dewi (Ed.)
Raudatul Ulum (Ed.)

PENANGANAN PAHAM GERAKAN KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI PAKISTAN, LEBANON DAN BRUNEI DARUSSALAM

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
2018

Rita Sukma Dewi (Ed.)
Raudatul Ulum (Ed.)

Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional

Pakistan, Lebanon & Brunei Darussalam

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di
Pakistan, Lebanon, dan Brunei Darussalam

Ed. 1, Cet. 1. —

Jakarta: Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan 2018

xiii + 92hlm; 14,8 x 21 cm.

ISBN : 978-623-7127-00-00

Hak cipta pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Cetakan pertama, Nopember 2018

**Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Pakistan,
Lebanon, dan Brunei Darussalam**

Editor: Rita Sukma Dewi & Raudatul Ulum

Tim Penulis: Anik Farida, Suhanah, Asnawati, Wakhid Sugiyarto,
Raudhatul Ulum, Fauziah, R Adang Nofandi

Hak penerbit pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan,
Jakarta

Desain cover & Layout : Achmad Rosidi

Penerbit:

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. M. H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340

Telp./Fax. (021) 3920425 - 3920421

<http://www.puslitbang1.kemenag.co.id>

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSLITBANG BIMAS AGAMA & LAYANAN KEAGAMAAN

Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan jalan dan kemudahan kepada kami dalam hal menerbitkan buku *Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Pakistan Lebanon dan Brunei Darussalam*. Buku ini adalah hasil kajian dan studi di tiga negara tersebut yang dilakukan oleh tim peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun anggaran 2017.

Penerbitan buku ini adalah upaya untuk menyebarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim, sebagai wujud tanggungjawab kami untuk melakukan transformasi pengetahuan kepada masyarakat khususnya tentang kehidupan keagamaan. Buku ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas ruang pengetahuan dan informasi di tengah-tengah masyarakat.

Semoga buku yang diterbitkan dapat memberikan suatu pengalaman membaca bagi pembaca sekalian, serta dapat menjadi acuan bagi pihak yang sedang menyusun tulisan, dan dapat berfungsi sebagai data dan informasi yang melengkapi informasi keagamaan. Tidak mudah untuk menghadirkan suatu naskah hasil penelitian menjadi suatu bacaan yang mengalir karena aspek originalitas masih dipertahankan pada buku ini.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang berperan penting dalam penerbitan ini:

- 1) Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas arahan dan dorongannya sehingga Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan dapat menyelesaikan penerbitan sesuai dengan yang direncanakan.
- 2) Dr Abdul Aziz yang telah memberikan prolog pada buku ini sedemikian apik dan mencerahkan.
- 3) Penulis buku, yakni para peneliti yang telah terlibat pada penelitian Benchmarking Penanganan Gerakan Keagamaan Transnasional Tahun 2017.
- 4) Tim Editor atas kerja dan tanggungjawabnya untuk mengedit dan merapikan naskah buku ini sebaik-baiknya.
- 5) Tim pelaksana teknis yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan hingga naskah buku bisa terbit.
- 6) Pihak lain yang memberikan bantuan teknis dan berkontribusi aktif dalam hal saran dan mutualisme buku ini sendiri.

Akhir kata, kami sadari buku ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan terutama dalam hal penulisan baik secara teknik maupun materi. Tentunya sumbangsih saran dan masukan dari pembaca kita terima sebaik-baiknya untuk perbaikan pada penerbitan berikutnya. Selanjutnya semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, Nopember 2018

Kepala

Puslitbang Bimas Agama

dan Layanan Keagamaan

H. Muharam Marzuki, Ph.D.,

NIP. 19630204199403 1 002

SAMBUTAN

KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI

Benchmarking urusan keagamaan adalah persoalan tersendiri, mengingat hubungan negara dengan agama di setiap negara berbeda-beda. Keberbedaan itu tentu saja berimplikasi terhadap kebijakan pada masing-masing negara. Penolak-ukuran dalam skala kenegaraan itu tidak sesederhana seperti bagi pengalaman antarorganisasi perusahaan atau lembaga yang kecil dan terbatas. Negara memiliki persoalan yang kompleks dan sesekali mengalami kejadian di luar perkiraan umum, terutama dalam hal relasi sosial dan budaya, meskipun aspek ekonomi dan politik seringkali juga menjadi pemicu terhambatnya mekanisme sosial.

Untuk hal yang sangat penting tersebut ke depan, bagi negara Indonesia harus terus belajar banyak mengelola segala persoalan keagamaan. Gerakan politik bernuansa agama dalam berbagai bentuk dan volume memberikan tekanan serius, terutama jika menumpang dalam tindakan kekerasan. Peristiwa bom di Surabaya dan penyerangan kantor polisi di Pekanbaru Riau, begitu berpengaruh terhadap psikologi hubungan antarpemeluk, setidaknya jarak tercipta karena kekesalan dan kecurigaan pasti muncul. Kondisi kerenggangan dan jarak antarpemeluk tersebut saat ini seberapa tingkat kerusakan kohesifitasnya belum ada yang

mengukur, mungkin saja ke depan dapat diciptakan suatu alat untuk mengukur hal tersebut.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melaksanakan tugas seperti biasa sebagai bagian dari fungsi untuk mendukung program pembangunan agama. Secara fungsional, beberapa peneliti belajar terkait tema penanganan gerakan transnasional di tiga negara yang secara spesifik melarang aktifitas organisasi Hizbut Tahrir. Sehubungan dengan tiga negara tersebut, satu negara yaitu Brunei Darussalam tidak secara parsial melarang Hizbut Tahrir. Tetapi kebijakan monolitik terhadap penerapan Islam berakidah Asy'ariyah, berfikir Syafiiyah membentengi negara tersebut dari aliran keagamaan lain. Apalagi berhubungan dengan gerakan politik seperti Hizbut Tahrir, deteksi terhadap gangguan nasional pasti segera diterjemahkan sebagai ancaman.

Pakistan tidak saja melarang Hizbut Tahrir, eksistensi Ahmadiyah semakin tertekan dan sangat sulit sekali berkembang, fatwa sesat dan dianggap sebagai golongan di luar Islam. Penal Code (*amandemen*), tentang Kesucian Nama Nabi Muhammad saw, dapat menyasar banyak penganut aliran berbeda dengan mayoritas Sunni Hanafi di Pakistan. Terutama mereka yang dituduh mengakui adanya nabi setelah Muhammad saw, pilihan pilhan narasi penganut Ahmadi tentang kehadiran Mirza Ghulam Ahmad sebagai pembaharu atau nabi tanpa risalah tak mampu menahan laju tuduhan penodaan agama.

Meskipun penganut Ahmadiyah memiliki peran penting dalam pendirian negara Pakistan, ruang gerak mereka semakin menyempit, tidak hanya tangan kekuasaan tetapi sampai penanaman kebencian sejak di bangku sekolah dasar di kalangan mayoritas. Begitu juga Syiah, penganutnya cukup signifikan sehingga tekanan dibalas dengan tindakan serupa. Keputusan politik dibalas dengan protes, tindakan kekerasan dibalas dengan kekerasan, udara dan langit Pakistan tidak pernah cerah selalu dipenuhi dengan permusuhan.

Lebanon memiliki keunikan tersendiri, negara Arab berdaulat yang juga dipenuhi dengan milisi bersenjata dan pengaruhnya sangat signifikan terhadap politik. Secara resmi, Lebanon sendiri memiliki angkatan perang yang terlatih dan resmi sebagai alat negara, tetapi di dalamnya juga milisi Hezbollah dan serdadu Phalangis yang muncul sebagai representasi dari kepentingan kelompok penganut Syiah (Hezbollah) dan Kristen (Phalangist).

Kelompok penekan ini sangat memengaruhi bermacam aspek keputusan negara dan pemerintah Lebanon. Bahkan proses politik selalu mengarah pada sharing power pada tiga kekuatan utama Sunni-Syiah-Kristen. Suatu proses demokrasi yang khas Lebanon tersebut terus berjalan hingga saat ini.

Buku Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Pakistan Lebanon dan Brunei Darussalam ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pembaca dan khalayak ramai untuk melihat kebijakan penanganan keagamaan di dalam negeri sendiri. Apakah Indonesia cukup

tepat dalam hal memerlakukan kelompok agama terutama gerakan lintas negara, atau beberapa hal perlu kembali mengkaji berdasarkan ukuran tindakan yang dilakukan tiga negara tersebut.

Jakarta, 14 Desember 2018

Kepala
Badan Litbang dan Diklat

Prof. H. Abd. Rahman Mas'ud, Ph.D
NIP. 19600416 198903 1 005

PRAKATA EDITOR

Buku yang hadir ini merupakan hasil kajian di tiga negara penting sehubungan dengan penanganan paham gerakan keagamaan transnasional oleh negara, dengan bingkai metode tolok ukur dari berbagai aspek terutama hal mendasar munculnya keputusan tertentu. Bukan perkara yang mudah untuk menarik garis persamaan penanganan karena segala aspek memang berbeda. Sistem politik dan kehidupan sosial pada masing-masing negara Pakistan, Lebanon dan Brunei Darussalam tidak terlalu banyak memiliki kesamaan, justru karena itulah menjadikannya kajian ini menjadi kaya guna melihat kemungkinan penolokukuran kebijakan yang dilakukan di Indonesia.

Dalam hal melihat penolokukuran penanganan gerakan transnasional ini, pertama yang harus dipahami adalah proses pengambilan keputusan pelarangan, misalnya satu kelompok keagamaan tidak diperbolehkan beraktifitas sebagai organisasi baik dalam tujuan politik maupun urusan lain dengan alasan-alasan masuk akal. Alasan yang logis di dunia modern tentu saja berkaitan dengan data, baik fenomena kasat mata maupun hasil olahan secara empiris. Tidak ada ruang dalam pengambilan kebijakan berdasarkan wangsit atau angan angan belaka. Kedua, instrumen pengambilan keputusan.

Dalam hal ini seringkali di negara modern sebuah keputusan pasti diuji legalitasnya, sangat lekat dengan teori kewenangan baik dalam perspektif subjektif, (*original intend*), maksud dasar dari aturan dasar bernegara dibuat, maupun

aspek objektif. Pengujian objek keputusan sama sekali dilekatkan kepada sasaran kelompok yang menerima akibat langsung. Kajian objektif ini mensyaratkan alasan-alasan empiris dengan berbagai tahapan yang seringkali membosankan bagi pengambil keputusan. Dalam ukuran akal sehat, aspek objektif melekat pada terminologi keadilan.

Kajian penanganan gerakan transnasional di tiga negara tersebut cukup memberikan peluang bagi penyusun bahan kebijakan untuk memerkaya kembali narasi dan bobot materi pengambilan keputusan selanjutnya. Pelarangan aktivitas, ajaran dan ideologi seperti HTI ini di Indonesia bukanlah pertama kali dilakukan. PKI dilarang tidak saja pada aktifitas politiknya, tetapi vonis terhadap ajaran komunis sebagai ideologi terlarang telah dilakukan sejak tahun 1965. Tidak dipungkiri banyak pihak meradang karena pikiran dan ajaran mestinya tidak bisa dilarang, divonis bersalah dan dipidana, faktanya pelarangan itu terjadi. Negara adalah pihak yang dapat menggunakan kewenangan otoritatif, memperbolehkan kelompok hidup atau mematikannya. Begitu juga akhirnya terhadap ajaran atau ideologi, atas dasar hukum dan peraturan, atau pertimbangan subjektif tertentu hak-hak hidup itu dicabut.

Sebaik-baiknya keputusan memertimbangkan keadilan, merujuk tegas pada kesepakatan dasar hidup berbangsa dan bernegara. Lalu bagaimana jika ancaman itu terasa justru pada lingkungan kebebasan dan peradaban, dengan kata lain penetrasi gerakan ideologis itu mulai berdampak pada penghilangan relasi harmonis antarwarga negara, relasi rakyat dengan pemerintah, merusak sendi-sendi kebangsaan?, jawabannya kembali pada hasil kajian yang dilakukan. Kali ini, kajian tersebut hadir secara terbatas berdasarkan

penolokukuran (*benchmarking*) pada tiga negara yang disebutkan dalam judul.

Demikian, semoga buku yang diterbitkan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memberi manfaat yang optimal.

Jakarta, Desember 2018

Rita Sukma Dewi

Raudatul Ulum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	iii
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Ri	v
Prakata Editor	ix
Daftar Isi	xiii
 Pendahuluan	 1
 Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Pakistan <i>Raudatul Ulum, Asnawati</i> <i>R. Adang Nofandi,</i>	 21
 Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Lebanon <i>Anik Farida, Wakhid Sugiyarto,</i> <i>Achmad Rosidi</i>	 59
 Penanganan Paham Gerakan Keagamaan Transnasional di Brunei Darussalam <i>Suhanah & Fauziah</i>	 77
 Penutup	 91

PENANGANAN GERAKAN PAHAM KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI PAKISTAN, LEBANON DAN BRUNEI DARUSSALAM

Pendahuluan

Ketika Orde Baru runtuh tahun 1998, gerakan keagamaan yang bergerak sembunyi-sembunyi, kemudian tampil di hadapan publik memanifestasikan jatidirinya. Sebagian disebut gerakan keagamaan transnasional, misalnya, Al-Ikhwaniyah Muslimin (IM/gerakan tarbiyah), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Syi'ah, Ahmadiyah (JAI) dan Jamaah Tabligh (JT).¹ Jamhari dalam penelitian tahun 2012 menemukan fakta, yaitu telah terjadi penurunan tajam minat mahasiswa mengikuti organisasi ekstra lama (HMI, PMII, IMM, GMNI dsb-pen), dan kemudian menjadi pendukung paham keagamaan transnasional di atas.²

Gerakan paham keagamaan transnasional itu sebagian bermasalah dalam koridor sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. Kehadirannya dipandang telah menabrak konvensi-konvensi kebangsaan mendelegitimasi Pancasila dan NKRI.

¹ Lebih jelas, lihat dan baca *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Ahmad Syafi'i (Ed), Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

² Jamhari, HT di Berbagai Negara, Makalah Narasumber pada kegiatan FGD tanggal 9 Juni 2017 di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan.

Organisasi dimaksud adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian Badan Litbang Kementerian Agama tentang HTI tahun 2010 menemukan fakta bahwa HTI telah membangun wacana-wacana keagamaan dan kenegaraan yang berbeda dengan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa.³ Di samping itu sebuah tim kajian teks yang dibentuk oleh Kepala Badan tahun 2011 menemukan berbagai teks dalam majalah Al Wa'i, tabloid (majalah resmi HTI) dan buku tulisan para tokoh HTI dimana argumen-argumen keagamaan HTI mengarah pada pendelegitimasi atau mempreteli pemahaman empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian teks itu merekomendasikan bahwa HTI sebaiknya dibubarkan, karena berbahaya bagi ideologi Pancasila (diganti dengan Islam), UUD '45 (diganti UUD Syari'at Islam), NKRI (negara Khilafah) dan Bhineka Tunggal Ika. Argumen-argumen keagamaan itu sebenarnya tidak masalah bagi Islam sendiri, karena sesungguhnya Islam tidak menjelaskan keharusan bentuk negara tertentu bagi umat Islam. Terpenting adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan. Bangsa Indonesi sudah sepakat bahwa ideologi negaranya adalah Pancasila dan bentuk negara adalah republik kesatuan, konstitusi UUD '45 dan mengakui kebhinekaan sebagai realitas kebangsaan yang harus diakui.

³ Lihat lagi *Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia*, Ahmad Syafi'i (Ed), Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2011.

Pada 8 Mei 2017 pemerintah berkehendak membubarkan (HTI), karena; *Pertama*, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, kegiatannya terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, aktifitas HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan, ketertiban masyarakat, dan membahayakan NKRI.⁴ Ketiga alasan pemerintah itu mungkin sudah melalui proses panjang dengan mengamati sepak terjang dan wacana yang dibangun sejak HTI berdiri, hingga keinginan membubarkan HTI. Dari alasan yang diambil itu kiranya sudah menjadi kesimpulan yang harus dilaksanakan untuk menjaga kesepakatan yang sudah ada. Kehendak itu disambut baik Kementerian Dalam Negeri 9 Mei 2017 dengan mengeluarkan kebijakan publik yaitu mengirim surat telegram kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melarang kegiatan HTI.

Ini berarti HTI di daerah secara langsung sudah dilarang, setidaknya kepala dibiarkan, tetapi tangan dan kakinya sudah diikat, artinya HTI tidak dapat lagi menyuarakan visi misinya secara bebas dan terang-

⁴<http://nasional.kompas.com/read/2017/06/01/15032971/mendagri.Persiapan.Pembubaran.Hti.Sudah.Matang>, Diunduh 12 Juni 2017

terangan. Prof. Jamhari sebagai narasumber 6 Juni 2017 menyebut bahwa, HTI adalah gerakan radikal ideologis dan gagasan, meski tidak radikal dalam tindakan. HTI tampil santun, tetapi wacana yang dibangun dapat menghantarkan pendukungnya melakukan tindakan radikal, setidaknya mendelegitimasi konvensi kebangsaan. Dalam penelitiannya tahun 2012, Prof. Jamhari merekomendasikan agar HTI diperingatkan, karena bangunan wacananya yang mendelegitimasi seluruh kesepakatan para pendiri bangsa.⁵

Hizbut Tahrir (HT) yang hidup di sekitar 43 negara di dunia dengan pengikut cukup besar, telah dibubarkan di 13 negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pembubaran dan pelarangan HT di berbagai negara itu, umumnya tidak ada penjelasan argumentatif yang memadai, karena tidak dilakukan melalui pengadilan meskipun sebagian besar merupakan negara republik demokrasi. Misalnya, Pakistan melarang HT karena seorang kolonel (HTI) melakukan kudeta tetapi gagal. Pemerintah Banglades melarang HT karena ada pengikutnya yang membunuh kaum nasionalis. Di Turki HT dilarang karena dituduh berkompot dengan Fathullah Gullen, melakukan kudeta tanpa bukti dan sebagainya. Tidak ada satupun negara republik demokrasi membubarkan HT melalui pengadilan, apalagi negara monarkhi (kerajaan, Keemiran). Jika benar pembubaran HTI akan dilakukan melalui

⁵Disampaikan Prof. Jamhari, pada Pembahasan DO Benchmarking HT di Berbagai Negara, 9 Juni 2017

pengadilan, maka itu akan menjadi yang pertama di dunia dan akan menjadi contoh bagi negara lain.

Jubir HTI, Ismail Yusanto 14 Juni 2017, mengatakan bahwa HTI adalah partai atau kelompok dakwah yang menawarkan berbagai gagasan yang bersumber dari agama Islam secara terbuka, tidak ada yang dirahasiakan, baik berdasarkan Sunnah maupun kultur yang sudah mengakar di kalangan umat Islam. Sebagai tawaran gagasan (jualan gagasan-pen), sehingga jika ada yang membeli dipersilahkan dan jika tidak mau tidak apa-apa. Semua ide dan gagasan itu terbuka untuk dilihat dalam laman situs resmi HTI maupun dalam seluruh pengajian HTI yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Seperti itulah yang diinginkan oleh HTI, semua berjalan alami dan biarkan masyarakat memilih semua gagasan keislaman dan kebangsaanya, yang terpenting tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD'45, dan bhineka Tunggal Ika. Jadi ketika umat Islam sudah merasa cocok, umat Islam sendirilah yang akan bermain secara politik dan HTI tidak lagi ikut berperan.

Berkaitan dengan HTI ini, Ahmad Syafi'i menyatakan bahwa HTI secara keagamaan tidak ada masalah karena yang diwacanakan adalah ajaran Islam, atau setidaknya milik umat Islam. Tetapi harus diingat bahwa Indonesia ini sudah berdiri atas kesepakatan. Sistem pengelolaan negeri ini sudah khilafah tetapi ala Indonesia yang dibangun atas dasar kesepakatan (mirip Piagam Madinah), seperti disampaikan oleh Natsir di

Karachi tahun 1952. Jadi mau khilafah seperti apa yang hendak diterapkan di Indonesia?. Berkaitan dengan syari'at Islam, pemerintah telah berusaha melaksanakan regulasi yang semakin mengakomodasi ajaran Islam⁶. Abdul Mukti, 19 Juni 2017 menyatakan di hotel Millenium bahwa yang terpenting adalah substansialisasi Islam dan bukan formalisasi Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah yang tokoh-tokohnya ikut membidani berdirinya negeri ini hanya ingin menciptakan masyarakat utama dan bukan mendirikan negara Islam.⁷

Pertanyaanya adalah, mungkinkah masyarakat muslim non HTI dan Pemerintah selama ini gagal memahami maksud dan tujuan HTI? Karena hampir seluruh buku yang bicara tentang gerakan radikal, selalu memasukan HTI ini. Radikal dalam pemikiran sudah jelas benar, tetapi radikal dalam tindakan tidak ada faktanya baik di dalam maupun di luar negeri. Ismail Yusanto merasa bahwa HTI tidak melakukan tindakan kekerasan apapun, apalagi melakukan makar terhadap pemerintah RI, tidak pernah menjelekkan Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, dan berupaya menggantinya. Ia merasa, pemerintah tidak pernah membuat teguran atau peringatan resmi seperti rekomendasi Jamhari, dan tiba-tiba bermaksud membubarkan tanpa argumen yang

⁶Disampaikn oleh Ahmad Syafi'i, sebagai Narasumber pada pembahasan desain penelitian ini, 20 Juni 2017

⁷ Abdul Mukti, Narasumber Seminar Kajian Aktual Keagamaan di Indonesia, Hotel Millenium, 19 Juni 2017

cukup. Karena itu menggali data berkaitan dengan kebijakan publik tentang pembubaran HTI, pemahaman Pemerintah Daerah terhadap kehendak Pemerintah Pusat, adanya surat tele Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, dan kepala Daerah Kabupaten Kota menjadi sangat penting.

Setelah pengumpulan data-data berkaitan dengan HTI, dilakukan benchmarking ke beberapa negara, baik yang melarang atau yang membiarkan eksistensi HT. Dengan benchmarking ini diharapkan, menemukan berbagai informasi berkaitan dengan argumen kebijakan pelarangan atau pembiaran HT hidup di beberapa negara tujuan.

Relevansi Studi

Gerakan transnasional yang kian serius masuk dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Sesuai dengan karakternya yang menembus batas negara dan bangsa, ideologi transnasional tentu saja menjadi penanding serius kemapanan ideologi yang telah berkembang dan mengakar dalam negeri, cukup relevansi benchmarking yang mencari kesesuaian antara penanganan negara lain dijadikan tolok ukur yang nantinya, struktur pengambilan keputusan tersebut nanti disandingkan dengan naskah perumusan kebijakan.

Selama ini, gerakan ideologi lintas negara tidak hanya dapat memengaruhi sistem sosial tetapi juga

lambat laun dapat mengganggu sistem politik dan pemerintahan. Menolokukuran memiliki urgensi pada kepentingan nasional mengamati pola penanganan dari berbagai negara sebagai bahan menyusun naskah kebijakan. Dalam hal benchmarking ini, dilakukan penelusuran kesesuaian antarkasus dan alasan mendasar apa saja dalam pengambilan keputusan penanganan aliran agama pada tiga negara di Asia, yaitu di Pakistan, Lebanon dan Brunei Darussalam. Studi penanganan paham atau aliran keagamaan transnasional di berbagai negara, tidak terlalu melebar pada berbagai aspek, fokus pada kelompok atau beberapa kelompok ideologis tertentu yang ditangani secara khusus juga oleh negara yang dituju.

Proses studi merujuk pada konsep dasar pengaturan agama, bagaimana negara mengontrol menangani persoalan pemeluk agama melalui kebijakan tertentu, baik dalam hal pengaruhnya secara politik maupun dalam interaksi antarwarga negara. Memahami penolokukurna sendiri, terjemahan bebas dari benchmarking adalah suatu proses terus-menerus untuk menganalisis tata cara terbaik di dunia dengan maksud menciptakan dan mencapai sasaran dan tujuan dengan prestasi dunia.

Menurut Teddy Pawitra, Bencmarking sebagai suatu proses belajar yang berlangsung secara sisitematis dan terus-menerus dimana setiap bagian dari suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang terbaik atau pesaing yang paling unggul. Goetsch dan

Davis, Benchmarking sebagai proses pembandingan dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri.

Empat cara yang digunakan dalam melakukan benchmarking, adalah:

1. Riset in-house.

Melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri maupun informasi yang ada di publik.

2. Riset Pihak Ketiga.

Membiayai kegiatan benchmarking yang akan dilakukan oleh perusahaan surveyor .

3. Pertukaran Langsung.

Pertukaran informasi secara langsung dapat dilakukan melalui kuesioner, survei melalui telepon, dll.

4. Kunjungan Langsung. Melakukan kunjungan ke lokasi mitra benchmarking (cara ini dianggap yang paling efektif).

Tentu saja, dalam melaksanakan studi penanganan kelompok agama dan keagamaan di suatu negara tidak bisa dilepaskan dari aspek hubungan negara dengan agama. Dalam hal ini ruang lingkup studi diturunkan lagi ke dalam bingkai manajemen agama. Meskipun itu juga masih dianggap luas, biasanya agama menempati ruang terpisah di berbagai negara yang berdemokrasi

mapan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri terhadap konsep sekularisasi. Bahkan di negara seperti Amerika Serikat, doktrin “pemisahan agama dari gereja” tidak berjalan mulus. Tesis sekularisasi konvensional yang menyatakan bahwa modernitas akan menjadikan agama terdesak dari ruang publik ke ruang privat, memerlukan reformulasi⁸.

Selanjutnya Abdul Aziz mengutip pendapat Clarke Cochran,⁹ tentang hubungan negara dengan agama, tesis ini mengandaikan, di alam modernitas agama tumbuh lebih “mem-privat”, sementara politik lebih “mem-publik” sehingga keduanya terpisah dengan sendirinya. Menurut Cochran, wilayah privat dan publik itu tidaklah seterpisah sebagaimana yang dibayangkan, karena masih tersisa ruang bagi pergerakan agama di antara kedua ruang tersebut. Cochran lalu mengajukan jawaban “model ketegangan” (*tension model*), yang memungkinkan para pendukung agama mengembangkan bahasa politik atau wacana sipil. Bahasa dan wacana seperti ini diperlukan sebagai tantangan bagi pengembangan wacana politik publik dalam masyarakat demokratis.

⁸ Abdul Aziz dalam Minoritas Ahama dan Otoritas Negara: Iran, Thailand, Filipina dan India. Diterbitkan Ouslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2017, halaman

⁹Sebagaimana dikutip oleh Philip E. Hammond: “Religion in Public and Private Life, by Clarke E. Cochran” dalam *Sociological Analysis* Vol. 52, No. 2, Religion in the United States (Summer, 1991) hlm. 224-225.

Abdul Aziz dalam pendahulunya buku Minoritas Agama dan Otoritas negara menarasikan kondisi pemisahan privat-publik yang pada dasarnya dapat diatasi dengan mengubah cara pandang terhadap tesis sekularisasi, persoalan yang sering menjadi polemik dalam menetapkan manajemen agama adalah dikotomi mayoritas-minoritas. Dikotomi tersebut bisa saja relevan dalam studi penanganan gerakan transnasional di tiga negara, karena negara biasanya melakukan peleburan atas kepentingan mayoritas dalam banyak hal.

Hal seperti ini terjadi misalnya di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat, khususnya dalam pengaturan mereka yang dikategorikan sebagai “kultus” (*cult*) atau *new religious movements* (NRMs). Namun, sebagaimana disimpulkan oleh James Richardson,¹⁰ dari pengalaman sejumlah negara, pengaturan kelompok minoritas juga berbeda dari satu negara ke negara lain. Di antaranya, terdapat negara yang memberikan cukup kebebasan beragama, sehingga keberadaan kelompok minoritas terjamin, dapat mengembangkan diri, melakukan rekrutmen anggota dan mengumpulkan dana.

Penting juga dalam hal memahami gerakan transnasional ini dalam sudut pandang teori yang

¹⁰James T. Richardson: “Regulating Religion, A Sociological and Historical Introduction” dalam James T. Richardson (editor): *Regulating Religion, Case Studies from Around the Globe* (New York, Springer Science+Business Media, 2004), hlm. 1-15

sedang berkembang. Teori Globalisasi dan Teori Social Movement. Dalam hal ini mengutip tulisan Mirza Dwiky Hermastuti¹¹ bahwa Teori Globalisasi dari kelompok polarisasi menjelaskan globalisasi menciptakan polar-polar atau kutub-kutub baru yang muncul sebagai kekuatan baru di dunia.

Globalisasi akan menghadirkan kutub lawan yang tetap kukuh pada kultur asalnya. Bahwa globalisasi bukan berarti persamaan kultur dan budaya, ketika kultur dianggap sebagai suatu aspek kehidupan yang mandiri dan sukar untuk mengalami penyatuan (Holton, 2000). Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan dari Huntington (1996) bahwa pasca perang dingin konflik yang terjadi adalah konflik karena benturan peradaban atau yang disebut *The Clash of Civilization*. Tesis ini diharapkan dapat menjelaskan tentang backlash yang dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional.

Sedangkan Teori Social Movement digunakan karena objek penelitian ini adalah gerakan sosial sehingga pendekatan ini dianggap paling tepat untuk dapat mengetahui alasan gerakan Organisasi Islam Transnasional. Lebih lanjut Mirza menjelaskan Gerakan Islam Transnasional muncul sebagai *rest* dengan melakukan backlash terhadap kekuatan Barat. Secara khusus backlash dalam penelitian ini ditunjukkan dengan penolakan

¹¹ Respon Organisasi Islam Transnasional Di Indonesia Terhadap Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 122-130

Organisasi Islam Transnasional terhadap upaya Barat dalam menangani kejahatan terorisme melalui program Global War on Terrorism (GWOt). Di Indonesia sendiri salah satu upaya GWOt dilakukan oleh BNPT melalui Program Deradikalisasi. Sehingga Organisasi Islam Transnasional di Indonesia mengasumsikan bahwa program deradikalisasi BNPT merupakan bagian dari Barat.

Dalam kerangka menggali dan menemukan format penanganan gerakan keagamaan transnasional adalah bagian dari dinamika masyarakat Indonesia untuk memelihara negaranya dari gangguan yang serius. Langkah strategis dengan mempelajari negara-negara lain, khususnya di lingkungan bangsa-bangsa Asia, menjadi kebutuhan. Terdapat beberapa isu yang dianggap krusial di negara-negara Asia yang perlu digali lebih mendalam, dan mencakup hal-hal sbb.: Bagaimana kebijakan pemerintah di masing-masing negara terhadap gerakan transnasional dan aliran bermasalah?; Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah masing-masing negara terhadap gerakan transnasional dan aliran bermasalah?; Apa argumen kebijakan Pemerintah terhadap sikap politik pembubaran atau pembiaran gerakan transnasional dan aliran bermasalah?; Bagaimana Respon gerakan bermasalah dan aliran bermasalah terhadap sikap politik pemerintah.

Melalui kajian benchmarking ini diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas berbagai aspek penting atau tidaknya penanganan aliran bermasalah terutama gerakan transnasional. Bagaimana

pemerintah dapat memiliki alasan yang cukup untuk membubarkan satu kelompok aliran keagamaan tertentu atau tidak. Dalam hal ini, kasus pembubaran HTI haruslah memiliki argumen kebijakan yang cukup kuat, pembelajaran pada negara-negara yang melarang atau membiarkan HT diharapkan membantu menguatkan keputusan berikutnya. Baik dalam hal membangun suatu dokumen pemikiran kebijakan tentang kebijakan khususnya HTI dan aliran keagamaan bermasalah lainnya.

Kerangka Studi

Suatu kebijakan publik seperti kebijakan pemerintah terhadap HTI tidak lahir dari ruang kosong (malam bermimpi, pagi-pagi membuat kebijakan), tetapi melalui proses panjang rumit dan mungkin juga berliku. HTI yang selalu menyebut dirinya sebagai partai atau kelompok dakwah dan hanya menawarkan wacana keagamaan mampu berlindung di balik keagungan ajaran Islam yang kebetulan dipeluk secara mayoritas bangsa Indonesia menjadi salah satu kerumitan itu. Karena itu tidak mudah membidik HTI sebagai gerakan makar. Jika membidikpun harus hati-hati agar pemerintah tidak terjebak sehingga membuat hubungan Islam dan Pancasila bertentangan. Jika tidak berhati-hati dalam hal ini, akan terjadi seolah-olah pemerintah menghalangi jalan dakwah Islam seperti di era Orde Baru, dan karenanya antagonism pemerintah dan

kelompok Islam akan terulang. Hal ini sekaligus akan memperlihatkan kegagalan pemerintah memelihara hubungan baik dengan elit-elit muslim negeri ini.

Implikasi dari kebijakan publik dijelaskan oleh Anderson bahwa; Kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan; Kebijakan berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah; Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan atau menyatakan akan melakukan sesuatu; Kebijakan publik bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Pemerintah yang berkehendak untuk membubarkan (HTI) dapat pula dilihat dari dua sisi positif dan negatif itu sekaligus. Boleh jadi kehendak itu benar-benar untuk menjaga ideologi, UUD '45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi boleh jadi merupakan impian segelintir orang kapitalis, karena HTI salah satu yang kelompok ideologis yang menentang kapitalisme yang membuat umat Islam di seluruh dunia menderita. Boleh jadi, tekanan kelompok pendukung politik tertentu yang tujuannya gagal dicapai.

Pemerintah hendak membubarkan HTI, karena; *Pertama*, HTI dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, kegiatannya terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, aktifitas HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan, ketertiban masyarakat, dan membahayakan NKRI. Dalam hal ini pemerintah dipastikan telah memiliki dan akan terus mengumpulkan berbagai informasi berkaitan dengan sepak terjang HTI. Dalam amatan seorang pengamat keagamaan misalnya, HTI dikesankan sebagai Ormas Islam yang sama sekali tidak pernah menilai kerja pemerintah secara positif. Pemerintah di era reformasi telah mampu membuat perubahan sosial, ekonomi, keagamaan dan politik sangat signifikan, sama sekali tak berilai bagi HTI. Memang belum semua berhasil, tetapi perubahan sosial keagamaan adalah sebuah proses panjang yang harus direkayasa secara terus menerus agar segera tercapai, dan landasan menuju kesanapun sudah dimulai. Sementara HTI melihatnya dengan sebelah mata, bahwa apa yang dilakukan pemerintah seolah-olah tidak ada apa-apanya, sehingga tidak pernah satu kalimatpun dari jubah HTI yang memuji pemerintah. Pemerintah memang tidak perlu dipuji, tetapi melihat secara obyektif kerja pemerintah secara adil harus dilakukan. Wacana khilafah

adalah bentuk wacana oposisi yang sia-sia, membuang energi bangsa yang cukup besar yang mestinya dapat diarahkan untuk pembangunan. HTI justru menggembosi republik dengan wacana khilafah, yang tidak jaminan akan terwujud keadilan dan kemakmuran.¹²

Sementara Kementerian Dalam Negeri telah mengirim surat tele Kementerian Dalam Negeri 9 Mei 2017 kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melarang kegiatan HTI. Ini berarti secara de jure, HTI sudah tidak bisa eksis, meskipun de jure itu tidak diproses melalui pengadilan yang adil. Tetapi sebenarnya kehendak pembubaran HTI itu hanya persoalan pemerintah berkomitmen atau tidak. Sebab HTI fakta hukumnya sudah ada sejak tahun 2000 yang lalu, dan semua sepak terjang HTI sudah diketahui. Jadi persolanya pada pemerintah sendiri, apakah akan membubarkan atau tidak dan kapan?

Penyusunan kebijakan publik oleh Kementerian Dalam Negeri tentu berproses melalui metode yang dipilihnya hingga kemudian melarang semua kegiatan HTI. Memang dalam hal ini belum jelas argument sesungguhnya sampai akhirnya muncul larangan melakukan kegiatan itu. Apakah ketiga alasan rencana pembubaran itu sudah merupakan kesimpulan argumen yang sebenarnya panjang lebar dan berlapis-lapis atau

¹² Abdul Jamil, Prasaran terhadap desain penelitian ini, 20 Juni 2017

ada notulasi-notulasi yang rumit berkaitan dengan banyaknya ragam pendapat di antara para penyusun kebijakan publik sendiri. Dalam buku analisis publiknya William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dilakukan melalui pengkajian dengan metode tertentu yang dianggap sesuai kebutuhan.¹³

Langkah-langkahnya adalah mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dan relevan dengan obyek kebijakan¹⁴, yang dalam hal ini adalah HTI dengan berbagai aspeknya. Dari berbagai informasi itu dirumuskan masalahnya¹⁵ argumen dan struktur argumennya atau menyusun formulasi kebijakan¹⁶ agar alasan pembubaran menjadi wajar dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah dan ciri-cirinya HTI dikaji secara mendalam yang kemudian mendapatkan argumennya secara terstruktur untuk kemudian dijadikan dasar meramalkan bagaimana, seperti apa dan akan menjadi seperti apa negeri ini dimasa depan akibat dari sepaik terjang obyek kebijakan¹⁷ (HTI) itu jika kebijakan publik yang menentukan tidak segera diambil.

¹³ William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 3 - 17

¹⁴ Ibid hal. 17 - 20

¹⁵ Ibid hal. 22 - 25

¹⁶ Ibid hal. 102 - 105

¹⁷ Ibid hal. 26

Metode

Studi pada berbagai negara ini dilakukan dengan sistim *benchmarking*, suatu pendekatan penelitian belajar dari lembaga lain/negara lain secara sistematis, nantinya prosedur yang ada dicocokkan atau sebagai alat ukur pada prosedur yang ada pada organisasi sendiri. Adapun menyangkut prosedur studi dilakukan dengan beberapa tahapan, pertama dilakukan dengan studi literatur, wawancara mendalam dan Focused Group Discussion (FGD). Riset literatur diarahkan kepada karya akademis tentang HT maupun HTI, dan publikasi HTI sendiri. Data utama dikumpulkan dari wawancara dan publikasi HT. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali pertama, tentang HTI yang dianggap tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, kegiatannya terindikasi bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, aktifitas HTI dinilai menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan, ketertiban masyarakat, dan membahayakan NKRI. Oleh karena itu informan utamanya Pemerintah negara tujuan dan orang-orang Indonesia yang memahami gerakan HT di negara tujuan itu.

PENANGANAN GERAKAN PAHAM KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI PAKISTAN

Raudatul Ulum, Asnawati, R Adang Nofandi

Kondisi Geografis

Geografi dan iklim Pakistan sangat beragam, dan merupakan rumah bagi aneka satwa. Pakistan memiliki area seluas 796.095 km², kurang lebih sama dengan luas gabungan Perancis dan Inggris. Pakistan merupakan negara terbesar ke 36 di dunia. Pakistan memiliki garis pantai sepanjang 1.046 km (650 mil) sepanjang Laut Arab dan Teluk Oman dan perbatasan darat sepanjang 6.774 km (4.209 mil) secara total: 2430 km (1510 mil) dengan Afghanistan, 523 km (325 mil) dengan Tiongkok, 2.912 km (1.809 mil) dengan India dan 909 km (565 mil) dengan Iran.

Dan memiliki perbatasan laut dengan Oman. Gunung K2, gunung tertinggi kedua di dunia setelah Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di negara ini. Gunung yang memiliki tinggi 8611 meter ini terletak di pegunungan Karakoram yang terletak di utara Pakistan yang berbatasan dengan Tiongkok. Pakistan menempati lokasi geopolitik penting di persimpangan Asia Selatan, Timur Tengah dan Asia Tengah.

Populasi Pakistan didominasi empat kelompok etnik yaitu Punjab, Pashtun, Sindh, dan Baloch. Penduduk asli Pakistan adalah keturunan orang-orang yang tiba di wilayah ini, baik sebagai penakluk atau pemukim, dalam sejarah panjang. Ada empat kelompok etnis utama di Pakistan, yang secara tradisional telah menghuni daerah yang sekarang membentuk empat provinsi negara. Kelompok terbesar adalah Punjabi. Mereka membentuk hampir 45 persen dari populasi Pakistan dan hidup terutama di dataran Punjab. Kelompok terbesar kedua, Pashtun, memiliki keterkaitan dengan orang dari tetangga Pakistan, Afghanistan.

Mereka tinggal terutama di pegunungan Provinsi Perbatasan Barat Laut. Kelompok Sindhi menempati provinsi selatan Sind. Kelompok Baluchi terdiri atas banyak suku nomaden. Mereka mendiami Baluchistan, provinsi terbesar tapi paling sepi dari empat provinsi Pakistan yang terletak di barat daya. Biro Sensus Amerika Serikat memperkirakan populasi Pakistan mencapai 199.085.847 (199.100.000) pada tahun 2015, yang setara dengan 2,57% dari populasi dunia. Pada tahun 2030, populasi Pakistan diperkirakan melebihi 200 juta jiwa. Dan pada tahun 2045, populasi diprediksi mencapai dua kali lipat. Populasi Pakistan didominasi empat kelompok etnik yaitu Punjab, Pashtun, Sindh, dan Baloch. Suku bangsa terbesar di Pakistan adalah Punjab dengan jumlah 78 juta jiwa (45%). Pashtun adalah kelompok etnik terbesar kedua dengan jumlah 29.3 juta jiwa (15.42%). Sindh membentuk populasi 24.8 juta jiwa

(14.1%). Menjadikannya kelompok etnik terbesar ketiga di Pakistan. Sementara Baloch tercatat berjumlah 6,3 juta (3,57%). Mereka tinggal di Provinsi Balochistan. Disana juga ada suku Hazara, Kalash, Burusho, Balti, dan Gilgit.

Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan persentase 97% dari Mayoritas penduduk Pakistan beragama Islam dengan persentase 97% dari jumlah penduduk. Sebagian besar dari mereka beraliran Sunni sedangkan sisanya pengikut Syiah dan Ahmadiyyah. Pakistan juga merupakan negara islam terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan India. Agama lain yang ada di Pakistan adalah Kristen, Hindu, Buddha, Jainisme, Zoroastrianisme, dan Baha'i. dari sekian juta penduduk Pakistan sebagian besar dari mereka beraliran Sunni sedangkan sisanya pengikut Syiah dan Ahmadiyyah. Pakistan juga merupakan negara islam terbesar ketiga di dunia setelah Indonesia dan India.

Di masalalu, wilayah yang sekarang disebut Pakistan memiliki kekayaan sejarah, peradaban muncul dengan mewariskan begitu banyak situs yang sangat bernilai tinggi, situs dari kebudayaan kuno seperti budaya Neolitik, Mehrgarh dan terutama Sungai Indus. Indus, adalah peradaban sungai yang diyakini sabagai awal mula tradisi Veda, meskipun di kemudian masa waktu Hinduisme bergerak ribuan kilometer menguat di dua aliran sungai Gangga dan Yamuna. Begitu juga dengan Persia, Indo-Yunani, Islam, dinasti Turki-Mongol dan kebudayaan Sikh melalui berbagai invasi, hadir

turut memer kaya peradaban. Walhasil, tempat ini memiliki berbagai peninggalan berbagai dinasti seperti dinasti Persia, Kekhalifahan Umayyah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, kesultanan Mughal, kesultanan Sikh dan terakhir Imperialisme Inggris mewakili pengaruh Eropa modern di kawasan tersebut.

Pakistan memperoleh kemerdekaannya dari Imperialisme Inggris pada tahun 1947 setelah gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah yang menginginkan negara merdeka dari bagian barat dan timur Kemaharajaan Britania Raya yang didominasi oleh Islam. Setelah mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1956, Pakistan secara resmi menjadi negara Republik Islam. Pada tahun 1971, sebuah perang sipil terjadi di negara bagian Pakistan Timur yang akhirnya membuat negara bagian tersebut berpisah menjadi negara baru bernama Bangladesh.

Pakistan merupakan negara federal dengan sistem parlemen yang terdiri dari 4 provinsi dan 4 daerah federal. Dengan penduduk lebih dari 170 juta orang, Pakistan menjadi salah satu negara terpadat di dunia dan memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia. Pakistan juga merupakan negara yang memiliki multi-etnis dan memiliki variasi dari segi geografis. Pada masa setelah kemerdekaan, Pakistan mengalami ketidakstabilan dalam pemerintah dan konflik yang terus terjadi dengan negara tetangga terdekatnya, India. Negara ini memiliki berbagai

tantangan dan masalah, seperti kemiskinan, buta aksara, korupsi serta serangan teroris.

Program benchmarking gerakan transnasional keagamaan di Pakistan adalah bagian upaya penguatan bahan dan argumen penanganan aliran dan faham keagamaan di Indonesia. Setidaknya ada tiga isu penting yang membutuhkan argumentasi sandingan terkait aliran dan faham keagamaan. Pertama menyangkut Naskah Akademik dan pengembangan draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Isu krusial dalam hal pengembangan naskah perundangan ini adalah definisi agama, menggunakan sepenuhnya istilah pengertian agama dengan batasan batasannya atau pilih lain yang tentunya dapat mengakomodasi istilah agama sebagai satu sistem ontologis.

Konsepsi agama sebagai hulu dari uraian kebijakan menyangkut kehidupan pemeluk dalam mendapatkan relasi yang tepat di depan sistim kenegaraan, baik dalam hal identitas sampai dengan pelayanan sipil.

Berikutnya adalah dampak dari terbitnya Perppu tentang organisasi masyarakat yang dalam perkembangan terakhir munculnya tutusan menolak oleh MK sehubungan dengan yudisial review atas Perppu dimaksud. Isu ketiga adalah terbitnya putusan MK tentang pembatalan beberapa pasal yang membatasi pencantuman agama, sehingga penganut kepercayaan tidak dapat mencantumkan keyakinannya di identitas

kependudukan. Putusan tersebut dengan pasti mengubah situasi pelayanan administrasi kependudukan beserta dampak yang muncul kemudian.

Pasti akan muncul tuntutan baru sebagai konsekuensi dari putusan tersebut. Istilah benchmarking ada kegiatan ini, adalah suatu metode panyandingan kajian tentang Pakistan sebagai negara yang telah melakukan banyak tindakan penanganan aliran bermasalah, gerakan transnaional dan konflik antarsekte. Terminologi Pakistan tidak hanya merujuk pada pemerintah Pakistan sebagai objek kajian, namun perkembangan di lapangan mendekatkan istilah tersebut dalam berbagai struktur sosial, budaya, politik dan isu keagamaan.

Pakistan sebagai subjek, dalam hal ini pemerintahan, terpenting menyangkut berbagai keputusan dan regulasi terkait penanganan aliran bermasalah, gerakan transnasional serta bagaimana menangani konflik antarliran. Kemudian kajian masuk pada struktur pakistan dalam dimensi historis, dipadukan dengan keterlibatan masyarakat dalam organisasi sosial, ikut serta menyelesaikan persoalan kebangsaan negara itu sendiri. Berikutnya kajian Pakistan sebagai sebuah entitas societias. Sebagai masyarakat yang memiliki tradisi dan kultur yang unik, serta munculnya berbagai kejadian kekerasan sebagai ruang lingkup kemasyarakatan. Bagaimana Pakistan melakukan penangan aliran dan gerakan transnasionalisme, penanganan aliran bermasalah serta

mengatasi konflik antarliran. Adapun tujuan studi dilakukan untuk: Mengetahui bagaimana Pakistan menangani aliran keagamaan bermasalah; Mengetahui bagaimana Pakistan menangani gerakan keagamaan transnasionalisme; Memahami bagaimana Pakistan mengelola konflik sektarian di negaranya

Struktur Sosial, Etnisitas dan Sistem Politik di Pakistan

Sejarah Pakistan diketahui berawal pada awal abad ke-17, ketika kelompok dagang British East Indian Company, Inggris mulai membangun kekuasaan di anak benua India yang saat itu berada di bawah kekuasaan Mongol. Pada pertengahan abad ke-18, Inggris mulai melibatkan diri di bidang politik dengan melakukan penaklukan sistematis terhadap wilayah-wilayah sub-kontinen. Inggris memperluas pengaruhnya ketika Mongol melemah dan kaum Sikh mulai mengembangkan kekuatannya. Inggris mengalahkan kaum Sikh berturut-turut pada perang tahun 1845 dan 1849 dan berhasil menguasai wilayah Punjab dan North-West Frontier, yang kemudian dimantapkan dengan pembentukan perwakilan politik di Lahore.

Pakistan berarti tanah yang murni dalam bahasa Urdu maupun bahasa Persia, meskipun ada beberapa catatan bahwa Urdu juga berakar pada bahasa Persia. Munculnya nama Pakistan dicetuskan oleh Choudhary Rehmat Ali, saat menjadi mahasiswa di Cambridge, kemudian menjadi tokoh gerakan bagi negara pecahan

dari India tersebut yang menerbitkan sebuah pamflet berjudul *Now or Never*. Sejak munculnya teori dua bangsa (*two nation theory*) oleh Allamah Muhamamd Iqbal, seorang tokoh yang sangat dihormati di Pakistan, maka usaha untuk mewujudkan menjadi negara diperjuangkan oleh banyak pihak yang sebagian dari mereka sudah menggabungkan diri ke dalam Liga Muslim. Pakistan tidak saja memiliki arti sebagai tempat murni tetapi merupakan *anagram* (lakuran) dari suku terpenting yang terdapat di Pakistan yaitu: Punjab, Afgan (Pahtun dalam bahasa Persia), KashmIr, Sindh, dan Balochistan¹⁸.

Setelah Perang Kemerdekaan (juga dikenal sebagai revolusi/pemberontakan Sepoy), dengan mengatas-namakan Ratu Victoria, Inggris memperluas kekuasaannya ke seluruh wilayah anak benua India. Pada tahun 1893 Inggris menciptakan Durand Laine yang memisahkan India dan Afghanistan serta memotong langsung wilayah suku Pathan (Pahtun). Hunza dan perbatasan Cina adalah daerah terakhir yang dicaplok Inggris pada tahun 1891.

Kesadaran tentang gerakan nasionalisme Pakistan, diawali oleh gerakan persatuan Islam yang digagas oleh Sir Syed Ahmed Khan tahun 1857 (1817-1898) dengan mendirikan gerakan Aligarh, dengan tujuan utamanya

¹⁸ Lihat pada buku *Pakistan Paradox, Instability and Resilience*, oleh Christove Jeffrelot halaman 83

mempersatukan kaum muslim. Namun gerakan tersebut pada akhirnya bubar, dan Inggris kemudian berhasil memperlemah dan menekan kaum muslim. Tahun 1930 penyair dan filsuf besar Islam Dr. Muhammad Iqbal mengusulkan untuk membentuk negara terpisah di sub-kontinen yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Usul tersebut didukung oleh Muhammad Ali Jinnah (seorang pengacara berpendidikan Inggris) dan selanjutnya pada tahun 1947 Inggris akhirnya menyetujui pemisahan diri tersebut. Setelah melalui proses perjuangan sulit, diputuskan bahwa negara berdasarkan Islam yang kemudian bernama Republik Islam Pakistan.

Wilayah yang diperoleh dalam pembagian ini adalah bagian luar dari ujung timur dan barat dimana mayoritas penduduknya beragama Islam, sedangkan wilayah bagian tengah menjadi negara India. Wilayah yang menjadi pangkal sengketa adalah Punjab karena masyarakatnya beragama Hindu, Islam dan Sikh. Pada saat kemerdekaan, diperkirakan 6 juta pengungsi Muslim dari Punjab menyeberang ke wilayah Pakistan, dan sekitar 4,5 juta pengungsi kaum Sikh dan Hindu berpindah ke wilayah India. Kesulitan lain adalah di wilayah Jammu dan Kashmir, dimana Raja Kashmir yang beragama Hindu memilih untuk bergabung dengan India (dibawah tekanan Nehru), walaupun penduduknya sebagian besar beragama Islam. Hal tersebut menyebabkan wilayah Kashmir terbagi dua pada tahun 1948. Sampai saat ini baik India maupun

Pakistan masih saling mengklaim Kashmir sebagai bagian wilayahnya dan menjadi ganjalan utama dalam hubungan bilateral kedua negara.

Sistim Politik dan Pemerintahan

Secara konstitusi, sistem pemerintahan Pakistan menganut sistem parlementer. Namun sejak Jenderal Pervez Musharraf mengambil alih jabatan Presiden melalui suatu kudeta tak berdarah pada bulan Oktober 1999, sistem tersebut pada kenyataannya mengarah pada sistem presidensial, dimana kekuasaan Presiden secara “de-facto” lebih besar daripada Perdana Menteri. Pemerintahan selama 9 tahun Presiden meskipun pada awalnya mendapat kecaman dari dunia internasional khususnya negara-negara Barat, namun kemudian berangsur berkurang dan keanggotaan Pakistan dalam organisasi Persemakmuran (commonwealth) pada akhir tahun 2004 dipulihkan kembali¹⁹.

Kepala Pemerintahan/Negara di Pakistan dari masa ke masa

- 1947-1948 : Quaid Azam Mohammad Ali Jinnah
(Gubernur Jenderal)
- 1947-1951 : Liaquat Ali Khan (Perdana Menteri),
terbunuh

¹⁹ Laman situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, kedutaan besar Islamabad Pakistan, diunduh 15 Desember 2017

- 1951-1955 : Malik Ghulam Mohammad (Gubernur Jenderal)
- 1955-1958 : Mayjen Iskander Mirza (Gubernur Jenderal dan Presiden)
- 1958-1969 : Jenderal Mohammad Ayub Khan (Presiden dan Penguasa Darurat Perang)
- 1969-1971 : Jenderal Mohammad Yahya Khan (Presiden)
- 1971-1977 : Zulfikar Ali Bhutto (Presiden dan PM)
- 1977-1988 : Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq (Presiden dan Penguasa Darurat Perang)
- 1988-1990 : Benazir Bhutto (Perdana Menteri)
- 1990-1993 : Nawaz Sharif (Perdana Menteri)
- 1993-1996 : Benazir Bhutto (Perdana Menteri),
dijatuhkan oleh Presiden Farooq Ahmed Khan Leghari
- 1997-1999 : Nawaz Sharif (Perdana Menteri),
dijatuhkan oleh Jenderal Pervez.
- 1999-2008 : Jenderal Pervez Musharraf (Presiden) mengundurkan diri.
- 2008 : Yousaf Raza Gilani (Perdana Menteri)
- Sept 2008 : Asif Ali Zardari (terpilih sebagai Presiden untuk jabatan 5 tahun).

Konstitusi

Konstitusi Pakistan adalah UUD 10 April 1973, yang dibekukan pada tanggal 5 Juli 1977 dan diberlakukan lagi dengan amendemen pada tanggal 30 Desember 1985. UUD tersebut kemudian dibekukan lagi oleh Jenderal Musharraf pada saat kudeta tanggal 15 Oktober 1999 dan kemudian diberlakukan lagi pada tanggal 31 Desember 2002.

Sistem Hukum

Sistem hukum yang diterapkan di Pakistan berdasarkan pada sistem hukum Inggris yang disesuaikan dengan status Pakistan sebagai negara Islam. Hukum Inggris bisa diinduksi ke dalam sistem hukum Pakistan sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu sistem hukum Pakistan juga didasarkan pada sistem hukum Islam dan menerima keputusan ICJ dengan pertimbangan.

Lembaga Eksekutif

Menyusul kudeta militer tak berdarah pada tanggal 12 Oktober 1999, Jenderal Pervez Musharraf membekukan Konstitusi Pakistan dan memproklamirkan dirinya dengan sebutan "Chief Executive". Pada tanggal 12 Mei 2000 Mahkamah Agung mensahkan kudeta tak berdarah tersebut dan memberikan kepada Jenderal Musharraf wewenang Eksekutif dan Legislatif selama

tiga tahun mulai dari tanggal kudeta. Pada tanggal 20 Juni 2001 Musharraf memproklamasikan diri sebagai Presiden dan mengambil sumpah menggantikan Mohammad Rafiq Tarar. Dalam referendum yang diadakan tanggal 30 April 2002 jabatan kepresidenan Musharraf diperpanjang hingga 5 tahun lebih. Tanggal 1 Januari 2004, Musharraf kembali memenangkan "vote of confidence" di Senat, DPR dan 4 DPRD propinsi.

Pada tgl 18 Agustus 2008, Presiden Pervez Musharraf memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan Musharraf untuk mengundurkan diri tsb dilakukan di tengah-tengah rencana pemerintah koalisi yang akan menurunkan Musharraf melalui impeachment di parlemen.

Lembaga Legislatif

Lembaga Legislatif Pakistan berbentuk parlemen bikameral yang terdiri dari:Senat (majelis tinggi) sebanyak 100 kursi yang dipilih secara tidak langsung oleh majelis propinsi untuk masa jabatan 4 tahun. Setiap propinsi diberi jatah 22 kursi, sedangkan FATA dan ibukota Islamabad diberi alokasi masing-masing 8 dan 4 kursi.

Majelis Nasional (majelis rendah) sebanyak 342 kursi, termasuk 60 kursi perempuan dan 10 kursi kaum minoritas dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilu multi partai. Ketua Majelis Nasional (Speaker)

saat ini dipegang oleh Dr. Fehmida Mirza (PPPP), sedangkan Ketua Senat adalah Farooq H. Naik (PPP). Majelis Propinsi (DPRD) sebanyak 728 kursi dipilih secara langsung oleh rakyat atas dasar pemilihan multi partai. Pemilu Senat terakhir diadakan pada Maret 2009 untuk memilih separuh anggota senat (50 anggota). Sementara itu Pemilu Parlemen (DPR) terakhir diadakan tanggal 18 Pebruari 2008.

Lembaga Yudikatif

Mahkamah Agung (Supreme Court) yang terdiri dari para hakim agung yang diangkat dan ditunjuk oleh Presiden. Sejak bulan Maret 2008, Ketua MA dipegang kembali oleh Ch. Iftikhar Mohammad Chaudhry setelah sebelumnya diberhentikan oleh Presiden Pervez Musharraf menyusul pemberlakuan Hukum Darurat tgl 3 Nopember 2007. Saat ini hakim agung pada MA berjumlah 17 orang.

Partai Politik

Pakistan menerapkan sistem multi partai dan koalisi antar partai bebas dilakukan kapan saja. Dalam pemilu setingkat DPR dan DPRD pada bulan 18 Pebruari 2008, lima partai besar yang berhasil memenangkan pemilu adalah:

- Pakistan People's Party (Bilawal Zardari Bhutto bersama Asif Ali Zardari);

- Pakistan Muslim League-N (Nawaz Sharif);
- Pakistan Muslim League-Q (Chaudhry Shujaat Hussain);
- Muttahida Qaumi Movement (Altaf Hussain);
- Awami National Party (Asfandiyar Wali).

Di Pakistan ada partai kecil, tidak punya anggota di parlemen tapi mampu menggerakkan ribuan umat, pakai pendekatan penolakan UU yang memuat nabi Muhammad Saw nabi terakhir. Pakistan Muslim Liga 188, PPP 46, Teriki 33, yang lain kecil. Demokrasi juga, ada parlemen, keputusan ada disitu. Sebenarnya partai yang duduk, republik Islam Pakistan. Partai yang duduk, bukan gambaran partai Islam. Seperti partai lainnya. Yang berafiliasi Islam murni, kecil. Munculnya UU Blasphemy, seringkali dipakai rezim untuk menekan seseorang dan kelompok tertentu.

Interest Group

Militer masih merupakan *pressure groups* yang masih dianggap kuat di Pakistan, baik di bidang politik maupun sosial. Selanjutnya kelompok berpengaruh lainnya adalah ulama, baik dari kalangan Sunni maupun Syiah; tuan tanah; industrialis dan para pedagang/pengusaha.

Struktur Sosial Keagamaan Pakistan

Pakistan memiliki kedekatan kultur dan tradisi dengan India, sebagian besar suku di Pakistan, terutama Panjabi sangat identik dengan orang Punjab di India. Mereka terpisah karena perbedaan agama, kebetulan secara geografis juga berada secara demarkatif, maka suku Panjabi terpisah. Sebagai penganut Islam mayoritas di negaranya, maka stuktur sosial sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam, dengan berbagai aspek unik tidak ditemukan di negara lain, misalnya tradisi honor killing.

Meskipun di Afganistan juga memiliki tradisi yang sama, karena secara etnik keduanya saling beririsan, terutama Pashtun. Seperti halnya etnik Panjabi (Punjab), Pashtun terpisah menjadi dua negara. Pasca berpisah dengan India tahun 1947 pakistan menjadi negara muslim yang berbentuk republik, menganut sistem politik demokrasi dengan hegemoni militer yang sangat kuat.

Pakistan secara kultutr tidak bisa pisahkan dari India, termasuk dalam hal strata sosial yang terjadi di Inida tidak sepenuhnya luntur meksipun menganut agama Islam. Setidaknya ada tiga golongan yang bisa dimiripkan dengan kasta, Ashraf-mereka terdiri atas kelas golongan yang mengklm sebagai keturunan nabi Muhammad Saw, biasa dipanggil Syed dan Syaikh. Kaum agamawan yang memiliki otoritas yang kuat dalam hal doktrinasi dan masalah masalah keagamaan, kemudian keturunan dinasti Mughal yang datang dari

Asia Tengah dan Persia.²⁰ Kemudian strata kedua disebut dengan Ajlaf- terdiri atas konverter dari kelas sosial kastyra (Rajputs), kaum pedagang (Vis) dan yang sebelumnya Sudra.

Mereka kaum terlatih dalam hal kemiliteran, penenun benang sampai dengan pekerjaan terlatih lainnya²¹. Kasta ketiga adalah Arzals - terdiri atas mereka yang sebelumnya dianggap kaum tidak tersentuh (untouchables). Golongan ini berharap dengan masuk islam dapat menghilangkan sekat sosial dan tradisi namun ternyata menghadapi kenyataan yang berbeda. Mereka bisa membaca Al Quran dan tradisi literasi keislaman lainnya tetapi tidak dapat mengajarkannya.

Secara geografik sistem sosial inipun terkonsentrasi, kaum Arzals sebagian besar menghuni daerah Sindu dan Punjab. Khususnya Bangis dan Churasan. Kaum Ashraf di Pushtun, Ajlaf di perkotaan karena memonopoli profesi sebagai aparatus. Sedangkan kaum Arzhal ini memang hidup di pedesaan, secara tradisional mereka juga akan dekat dengan kaum Asrhaf. Problem sosial yang secara kultural yang dihadapi Pakistan adalah istilah murni dan tidak murni, sehingga muncul perkawinan endogami, sulit terjadi perkawinan silang antargolongan.

Gerakan kebangkitan islam tradisional dan revivalist secara bersama tumbuh, revivalist dinspirasi

²⁰Ibid. hal. 21.

²¹ Ibid hal. 19

oleh gerakan wahabisme, masing masing oleh Shah Waliyullah (1706 – 62) dan Syed Ahmad Barelwi (1786 – 1831). Dua figur penting dari Islam India yang memiliki niat yang sama untuk membersihkan pengaruh dari Hindu terhadap Islam.

Deobandi merupakan gerakan tradisional revivalis yang tumbuh berkembang di India, menginspirasi banyak pengikut di Pakistan. Gerakan islamisme di India yang ditransformasikan di Pakistan cukup efektif memobilisasi kekuatan islam di Pakistan. Gerakan islam revivalis inilah yang kemudian hari digunakan secara politis oleh militer dan penguasa pemerintahan. Agama-agama non-Muslim termasuk Agama Hindu dan Kristiani, masing-masing dengan 2.800.000 (1,6%) jumlah penganut per tahun 2005.²² Kepercayaan Bahá'í mengklaim 30.000, diikuti oleh Sikh, Buddhis, dan Parsi, masing-masing mengklaim 20.000 penganut,^[15] dan sebuah komunitas yang sangat kecil dari penganut agama Jaina.

Gerakan Keagamaan Transnasional di Pakistan

Serangkaian *Focused Group Discussion* bersama pejabat KBRI Islamabad, merumuskan beberapa hal penting. Secara umum dipahami, dalam banyak hal

²² Sectarian War. Oxford Press 2011. Sectarian War: Pakistan's Sunni-Shia Violence and its links to the Middle East.

Pakistan sangat banyak belajar pada Indonesia, termasuk urusan mengelola hubungan antaragama, penanganan aliran keagamaan. Perbedaan keyakinan itu dengan pelembagaannya dalam agama, organisasi keagamaan atau variannya memiliki titik temu, yaitu sisteim nilai.

Pada *value system*, semua entitas menemukan irisan. Begitu juga dengan agama lain, satu sama lain memiliki kesamaan, bagaimana kita menerjemahkan Ketuhanan Yang Maha Esa di Indonesia, tetapi dalam pembukaan UUD menggunakan atas berkat rahmat Allah. Ada aspek doktrin kebangsaan, dan alasan historis tentunya. Semua agama memberi warna tanpa menghilangkan aspek sejarah dan peranan kelompok dan kekuatan masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini menyangkut kenegaraan, membutuhkan tafsir yang jelas, makna ketuhanan itu ke dalam bentuk pemerintahan, perundangan dan implementasi pelayanan. Apakah hanya dari satu perspektif keyakinan?. Atau keyakinan yang lain, atau titik temu itu adalah jalan masuk membangun sistim bersama. Kenapa juga di dalam hubungan antaragama masih ada yang merusak tempat ibadah. Di Indonesia seperti kasus gereja Santa Clara Bekasi, persoalan perizinan, atau relasi antaragama yang retak. Mesti ada alasan-alasan logisnya kenapa itu terjadi.

Pakistan, seperti dibahas sebelumnya, harus banyak belajar pada Indonesia, terutama menyangkut perlindungan umat beragama. Indonesia mereka anggap

sudah mampu menciptakan satu sistem hubungan antaragama yang lebih baik. Pakistan sangat menonjol pada aspek konflik sektarian, bagaimana Ahmadi akhirnya dikeluarkan dari rumah Islam, kemudian ada konflik syiah dengan sunni yang sampai sekarang secara laten masih terasa yang suatu saat bisa pecah. Uniknya sebagian besar penganut Ahmadi memiliki kehidupan yang baik, kaya, mereka tinggal pindah kalau tidak cukup leluasa di Pakistan. Mungkin juga ke India. Sedangkan syiah juga dianggap bukan Islam, awalnya saat Ahmadiyah dikeluarkan dari Islam, Syiah mendukung bahkan sampai munculnya Penal Code terhadap penganutnya. Sampai suatu saat, Syiahpun mengalami hal sama, difatwakan sesat (murtad) dan bukan bagian dari Islam.

Analisis Historis Kekerasan di Pakistan.

Struktur kekerasan di Pakistan demikian unik, tidak berdiri sendiri misalnya pada persoalan politik semata. Latar belakang sosial budaya dan ekonomi mendekatkan diri dengan kekerasan, kemiskinan dan kesulitan hidup di negara tersebut menyuburkan berbagai ideologi kekerasan, baik yang berbasis kesukuan maupun agama. Meskipun juga tidak dapat ditampik latar belakang kepentingan politik, baik secara regional maupun kepentingan global. Dampak perang Afganistan merembes ke tetangganya, invansi Uni Soviet mengawali polarisasi kekerasan komunal, baik karena kepentingan

perlawanan yang berimbas juga terjadi secara horisontal. Kemudian meningkat pasca 11 September 2011, serangan terhadap Afganistan oleh USA, menumbuhsurburkan kebencian yang akut terhadap bangsa barat. Belum lagi polarisasi di antara kepentingan Arab Saudi dan Iran sendiri²³.

Gesekan Sunni Syiah bukanlah hal mudah untuk diuraikan menjadi narasi yang beradab, semua berlangsung dengan senjata, menghangat-panas dan pecah menjadi konflik terbuka. Kemudian bersisa dalam letupan kecil dan renggangnya hubungan sosial antarpemeluk.

Honour Killing

Tradisi honor killing masih hidup di Pakistan, meskipun tidak hanya negara tersebut yang memiliki tradisi ini, sebagian negara Arab disebutkan juga menganut nilai dan mempraktekan hal yang sama. Honor killing tidak hanya karena intensitas kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga aspek nilai yang menjadi modtifnya sangat menarik perhatian banyak pihak di luar Pakistan. Kemungkinan tradisi ini hidup di Pakistan dan Afganistan, Jordania sampai dengan

²³ FGD dengan anggota Muslim Institute, peneliti diterima oleh Taheer Mahmood dan teman-temannya, mereka sangat intens melakukan kegiatan sosial dan budaya untuk menumbuhkan suasana perdamaian di Pakistan dengan berbagai pendekatan.

Lebanon tidak bisa dilepaskan dari tradisi ini, agama tidak mengajarkannya tetapi seringkali dilibatkan dalam hal membenaran.

Honor killing didefinisikan sebagai pembunuhan yang dirancang, disetujui oleh anggota keluarga, pelakunya selalu laki-laki, apakah itu bapak, saudara laki-laki, atau kombinasi keduanya, sasarannya adalah perempuan anggota keluarga yang dianggap mencoreng nama baik keluarga. Tindakan honor killing untuk mengambalikan dan membersihkan nama baik keluarga, karena hanya darah penodanya yang dapat menghapus rasa malu di hadapan masyarakat dan struktur sosial di Pakistan.

Beberapa kasus yang terjadi bahkan terjadi pada keluarga terdidik, seorang dokter perempuan yang berayah dokter dan beribu terdidik juga tidak terlepas sebagai korban honor killing. Kasus terhadap dokter tersebut karena perceraian dengan suaminya, sang perempuan sempat lari dan bekerja di Inggris, dibujuk disuruh pulang untuk menyelesaikan persoalan, namun yang terjadi akhirnya dibunuh oleh bapaknya sendiri.

Penghakiman terhadap terduga pelaku Blaspemy

Terjadi pembunuhan atas pelaku *blasphemy*, penodaan agama seakan diperbolehkan oleh semua orang. Kasus seorang pengawal yang membunuh seorang hakim yang dianggapnya sebagai penghina Nabi

Muhammad Saw, mendapatkan reaksi publik luar biasa, emosi keagamaan begitu saja tersulut dan mendapat dukungan banyak orang ketika topik penghinaan terhadap agama Islam terjadi.

Ribuan orang berkumpul dan *longmarch* menuju gedung pengadilan untuk memberikan dukungan terhadap Muhammad Mumtaz yang divonis mati karena membunuh hakim Salman Tatsir di Pinjab. Pelaku dianggapnya pahlawan karena membela kesucian agama, nabi agung direndahkan oleh hakim secara terang terangan, banyak orang berharap dapat menjadi seperti ini dalam hal membela agama. Hukuman terhadap pelaku penghinaan terhadap agama sangat keras di Pakistan, seringkali juga bias karena tidak semua pelaku mati karena vonis pengadilan tetapi oleh pihak tertentu.

Masyarakat seakan memiliki hak yang sama dalam hal menjalankan hukuman terhadap pelaku penghinaan ini. Kekuatan massa mendukung segala tindakan di luar hukum, sehingga cukup menyulitkan penegakan hukum di negara tersebut.

Syiah di Pakistan

Pada bendera Pakistan terdapat dua warna, hijau dan putih. Hijau itu melambangkan kelompok Islam dan putih selainnya. Konsepsi keadilan untuk semua menjadi tonggak dasar negara Pakistan didirikan, meskipun

terjadi kesepakatan antara ulama dengan pemerintah bahwa negara merupakan bentuk pelaksanaan ajaran Islam, terutam bersumber pada Alquran dan Hadits. Dijalankan dengan sistem republik dan demokrasi, dinamika penafsiran antaraagama dan negara ini berlangsung pasang surut sampai muncul pelik gerakan anti Ahmadiyah. Pada akhirnya Ahmadiyah dikeluarkan dari area hijau dan dianggapnya di luar Islam.

Kelompok Syiah awalnya ikut menyetujui Ahmadiyah dikeluarkan karena dianggap menodai ajaran Islam dengan menganggap adanya nabi setelah Muhammad Saw. Puncak dari perseteruan Syiah dan Sunni adalah dengan munculnya *Sectarian War*, perang antarsekte di Pakistan.

Pemicu kekerasan dimulai dengan munculnya fatwa ulama Sunni yang didukung Deobandis mengeluarkan fatwa Syiah adalah bukan bagian dari Islam. Munculnya polarisasi antar dua negara berkepentingan atas sekte, Arab Saudi dan Iran, keduanya merupakan negara yang banyak menyuplai doktrin, logistik dan persenjataan kepada dua kelompok.

Posisi Syiah di Pakistan sendiri relatif tidak terkait langsung dengan wikayatul fakih Iran, ulama Syiah dan jemaah di negara tersebut sebagian besar merujuk pada marja' di Najaf Irak. Tokoh sekelas Imam Khomeini tidak terlalu populer di kalangan Syiah Pakistan, karena marja'nya di Najaf, tetapi kesamaan teologis dan solidaritas penganut Syiah membuat Iran banyak terlibat

dengan berbagai persoalan sektarianisme di negara tersebut. Berlanjut pada ketegangan sampai kekerasan secara simultan, dan sesekali di beberapa tahun terakhir. Berbeda dengan Ahmadiyah setelah dikeluarkannya fatwa dan keputusan pada amandemen konstitusi sebagai kelompok di luar Islam, Syiah melakukan perlawanan baik protes langsung ataupun dengan tindakan perlawanan bersenjata saat pemerintah memihak kelompok penentang keberadaannya.

Ahmadiyah

Masyarakat Pakistan lebih mengenal dengan istilah Qadian. Ahmadiyah secara hukum sudah dianggap bukan Islam, populasinya tidak terlalu besar. Jarang bisa ditemui karena cenderung menutup diri, sekuat-kuatnya pengaruhnya adalah peran mereka yang kuat di luar negeri, terutama di Inggris dan India. Diperkirakan 2,3% dari populasi Pakistan adalah Ahmadiyah, sebab kuatnya tekanan dari kelompok ekstremis Sunni ditetapkan sebagai 'non-Muslim' oleh amandemen konstitusional tahun 1974, meskipun mereka menganggap mereka sendiri sebagai Muslim. Kejelasan status Ahmadiyah tidak lebih menguntungkan dibanding Syiah yang mengalami serangkaian kekerasan, setidaknya cukup paradoks karena penganutnya ada yang menjadi perdana menteri.

Sebelum amandemen konstitusi, sejak terbitnya UU 1973, Ahmadi sudah diputuskan bukan bagian dari

Islam, dilarang menyebut mesjid pada tempat ibadahnya. Doktrin kesesatan Ahmadi ini masyahur di kalangan Sunni, sejak kecil pada pendidikan dasarnya sudah ditanamkan. Sampai dengan pelarangan pencantuman agama Islam di Paspor, karena pada ID tidak ada pencantuman agama. Berbeda dengan Syiah yang tidak dikenalkan sebagai penganut murtad dari Islam dalam aturan formal, tetapi perilaku mayoritas seakan membolehkan berlaku semena pada minoritas.

Mayoritas mendapatkan hak istimewa, area hijau di bendera Pakistan adalah milik Sunni. Mengacu pada kepentingan mayoritas Sunni tanpa ada kebijakan yang tegas dalam hal perlindungan terhadap kelompok rentan dan terbatas aksesnya terhadap politik, dan perundangan serta kebijakan implementatif lainnya menyangkut hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Mengacu pada kehidupan di lembaga pendidikan, relasi antaraliran secara individual terjadi dalam lingkup terbatas terutama karena kesamaan suku, daerah atau secara umum didekatkan oleh isu kewilayahan. Balochistan adalah daerah yang seringkali berseberangan dengan kebijakan pemerintah Pakistan, tumbuh perlawanan karena persoalan ketidakadilan antarwilayah. Begitu juga dengan organisasi kemahasiswaan yang cenderung dimobilisasi pada aliran keagamaan dan daerah asal.

Kenyamanan dalam hal berekspresi mengakibatkan pengelompokan pada penganut Brelwi, Syiah,

Sunni, semuanya memiliki jarak jika mengelompok serta jarang sekali perkawinan antarsekte. Aliran keagamaan di Pakistan cukup dinamis, setelah memisahkan diri dari India. Dasarnya pemisahan ini atas dasar agama. Moh Iqbal yang memiliki teori penyelesaian dua negara, berdasarkan agama. British India. Paradok atas teori dua negara dari Allamah Muhammad Iqbal justru terjadi pada tahun 1991 Bangladesh berpisah dari Pakistan. Ternyata agama tidak lagi menyatukan. Deobandis, secara prinsip lebih dekat dengan Wahabi, meskipun secara fikih cenderung Hanafiyah, mobilisasi kelompok ini sangat kuat saat Afganistan berperang dengan Uni Soviet.

Hizbut Tahrir

Secara definitif Hizbut Tahrir dianggap sebagai organisasi terlarang di Pakistan, akibat upaya kudeta oleh seorang petinggi militer yang disusupi oleh dotrin khilafah versi Hizbut Tahrir. Akhirnya gerakan militer itu bisa digagalkan, pihak yang terlibat dihukum mati. Pasca upaya kudeta dengan kekerasan tersebut, gerakan Hizbut Tahrir tidak banyak diketahui di permukaan, dengan rezim yang cukup agresif menyulitkan kelompok tersebut mengembangkan diri.

Konflik Sektarian

Sektarianisme atau kekerasan sektarian di Pakistan mengacu kepada serangan terhadap orang dan

berbagai tempat di Pakistan yang dimotivasi oleh antagonisme terhadap sekte sasaran, umumnya merupakan kelompok keagamaan. Sasaran di Pakistan mencakup Sunni, Syi'ah,²⁴ Sufi, dan kelompok keagamaan kecil dari Ahmadiyah, Hindu, dan Kristen. Sebanyak 4.000 orang diperkirakan tewas dalam konflik sektarian Syiah-Sunni di Pakistan antara tahun 1987–2007.²⁵ Dan sejak tahun 2008, "ribuan orang Syiah" terbunuh oleh ekstremis Sunni menurut kelompok hak asasi manusia Human Rights Watch.²⁶

Salah satu aspek penting serangan terhadap Syiah di Pakistan adalah gerilyawan sering menargetkan tempat beribadah Syiah (Imambargah) saat salat untuk memaksimalkan korban jiwa serta untuk "menekankan dimensi keagamaan dari serangan mereka". Human Rights Watch juga menyatakan bahwa pada tahun 2011 dan 2012 kelompok minoritas Pakistan, Hindu, Ahmadiyah, dan Kristen "menghadapi ketidakamanan

²⁴ Kekerasan terhadap Sunni oleh Syiah jarang sekali terjadi, namun jika itu terjadi akan memicu konflik besar karena yang dibunuh biasanya tokoh penting di lingkungan Sunni (Sectarian War) hal 11

²⁵ Ibid.

²⁶ Laporan sepanjang 62 halaman, "'We are the Walking Dead': Killings of Shia Hazaras in Balochistan, Pakistan," merekam berbagai usaha kelompok militan Sunni menyerang masyarakat Syiah Hazara di Balochistan. Sejak 2008, ratusan orang Hazara, umumnya penganut Islam Syiah, terbunuh dalam kekerasan, termasuk pengeboman di ibukota provinsi Quetta, masing-masing pada Januari dan Februari 2013, yang membunuh sedikitnya 180 orang.

dan penganiayaan yang belum pernah terjadi di negara ini". Serangan terhadap tempat-tempat suci Sufi oleh Salafi juga telah dilaporkan.

Di antara mereka yang dianggap bertanggung jawab karena kekerasan sektarian di negara itu adalah kelompok militan Sunni, seperti Lashkar-e-Jhangvi, Sipah-e-Sahaba, Tehrik-i-Taliban Pakistan (affiliates of Al-Qaeda), Jundullah (afiliasi dari Negara Islam Irak dan Syam). Lashkar-e-Jhangvi "telah mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar serangan" terhadap Syiah menurut Human Rights Watch.

Kelompok militan Sunni juga dianggap bertanggung jawab atas serangan terhadap sesama Sunni, Barelwi dan Sufi. Serangan-serangan ini kadang-kadang mengakibatkan serangan balas dendam oleh korban. Brelwi (Brelvi), tidak radikal dalam pandangan keagamaan tetapi sangat keras terhadap urusan akidah. Sebagai kelompok yang bercorak sufistik, gerakan Barelwi ini cukup unik, biasanya sufisme cenderung lentur menerima pemahaman diluarnya namun mereka turut serta dalam hal melepaskan semua yang berbau Hindu dari ajaran Islam. Khususnya saat mereka ikut serta menyeberang dari India ke Pakistan saat dua negara ini berpisah.

Masyarakat Pakistan sangat keras dan kaku dalam memegang prinsip agama. Bahkan fanatisme tumbuh subur sampai pada kelompok aliran atau sekte, mereka yang menganut Brewli, Deobandis, Syi'ah semuanya

begitu kental pada prinsip kelompoknya. Syiah secara populer di Pakistan disimbolkan dengan bendera, hitam, simbol kesedihan peristiwa assura. Deobandis adalah kelompok garis keras Sunni, doktrin ajaran hanafiyah secara fikih, terpusah di Deoband India sebagai pusat ulama, secara ajaran sangat keras menyeret sunni yang lain harus sama dengan mereka.

Kelompok Brelwi cukup unik, memiliki sistem ritual sosial sendiri dan berkembang dengan baik di daerah utara. Banyak penyebarannya di Pakistan, pengikut Brelwi memiliki ciri berikat kepala hijau. Deobandis adalah revivalis tradisional, tetapi Brelwi juga tidak menjaga budaya Pakistan, justru membangun sistem budaya sendiri tidak selalu berpijak pada nilai-nilai etnik dan lokalitas. Ciri khas utama Brelwi adalah kalau wirid dijaharkan, solawat keras. Bedanya dengan Nahdlatul Ulama di Indonesia yang menjaga tradisi masyarakat di masa lalu sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dibiarkan saja, sedangkan Brelwi cenderung berusaha memisahkan pengaruh Hindu di masyarakat Pakistan. Dalam pemahaman mereka saat perayaan maulid dan bersolawat, cukup menonjol jika dilihat oleh pihak di luar Brelwi yang menganggap nabi hadir di belakang imam, makanya harus ada tempat yang dikosongin²⁷. Brelwi atau *Ahle-sunnah*, adalah gerakan sufisme Sunni di provinsi bagian utara India, Uttar Pradesh, dari Bareilly, Rohilkhand, India, sebagai tempat

²⁷ FGD dengan PPMI Pakistan 8 November 2017

permulaan muncul sekte ini. Didirikan oleh *Muhammad Riza Khan* atau juga dikenal dengan nama *Ahmed Raza Khan*, seorang ulama berasal dari Afganistan pada abad ke 19²⁸.

Para pengikut Barelwi menyebar di empat provinsi yang ada di Pakistan; Punjab, Balochistan, Sind dan NWFP (North West Frontier of Pakistan). Sebenarnya bukan hanya di Pakistan tetapi di seluruh wilayah anak benua India mencakup daerah Asia Selatan, Nama *Barelwi* diambil dari nama kota dan para pengikutnya berasal kemudian disebut dengan *Barelwi* yang mempunyai pengikut besar berasal dari bagian masyarakat Islam dari mazhab Hanafi di India, Pakistan, Bangladesh, Afrika Selatan, dan Inggris dan keberadaannya menyebar ke seluruh dunia²⁹.

Ketika pemisahan Pakistan dari India, ribuan pengikut *Barelwi* ikut hijrah ke **Pakistan** dan mayoritas menetap di wilayah Sind, provinsi yang berada di sebelah selatan. Di wilayah ini pengikut Barelwi banyak melakukan rekrutmen terhadap organisasi politik terkenal bernama *Mohajir Qaumi Movement (MQM)* yang menginginkan Sindu merdeka dari Pakistan. Beberapa pihak menganggap Barelwi memiliki struktur teologis

²⁸lihat: "Brelvi" dalam "The Oxford Enc. Of the Modern Islamic World, (ed. In Chief) John L. Esposito, Vol. 1, (Oxford University Press 1995)

²⁹*Ibid.*

sendiri, meskipun dianggap sebagai hanafiyah dalam hal aspek fiqh.

Kelompok lain yang berkembang adalah Ahlul Hadis, pengaruh pemerintah Saudi Arabia melalui mereka. Ahlul Hadis kalau di Indonesia dikenal Salafi, gerakan mereka cenderung puritan dan memiliki sistim dakwah berbeda dengan aliran lain. Konflik antara Sunni Syiah sering terjadi di Rawal Pindi. Komposisi Syiah di Pakistan tidak hanya Itsna Asyaari yang bermarja' ke Najaf, sebagian lagi penganut Ismaili. Saling menekan satu kelompok terhadap kelompok lain tergantung daerahnya, di wilayah yang mayoritas Syiah juga bisa menekan secara intensif Sunni. Tentunya keunikan hubungan dengan Iran terjadi, secara sekte tidak bermarja', tetapi secara politik memiliki hubungan karena dukungan yang kuat dari Iran.

Karachi adalah pusat pendidikan Islam yang cenderung tradisional, sistemnya mirip tabligh, Binoria dan Binoriton, lebih cenderung dipengaruhi oleh madrasah. Namun ijazahnya disetarakan dan diakui oleh negara. Perdebatan khilafiyah seringkali terjadi di Pakistan di berbagai area, bahkan hanya urusan kecil menjelang sholat, ikamat, makmum sudah berdiri, imam belum. Alasannya ikamat datang, imam menunggu hadirnya Nabi saw. tentunya ini tidak ada di Usuluddin, sampai dengan perdebatan hukum mencium mushaf Al Quran.

Hubungan antaraliran secara sosial sulit dibedakan, biasanya akan terasa setelah terasa agresifitas penyelisihan. Tidak hanya oleh Syiah ke Sunni, namun juga oleh kelompok Deobandis terhadap selainnya. Faisalabad adalah daerah yang mengenal demarkasi antara kelompok Sunni dan Syiah. Keduanya secara alamiah terpisah sejak lama. Sedangkan Islamabad itu cukup berbaur, karena daerah baru yang dijadikan ibukota, dari kota kecil menjadi besar. Hubungan antaraliran tidak terlalu kental gesekannya. Justru pengamanan diutamakan untuk mengurangi dampak konflik di berbagai provinsi. Antarsekte cukup bisa berinteraksi, cenderung paling toleran, sehingga posisi sekte seseorang dapat diketahui pada saat menjelang perayaan hari besar yang berbasis pada alirannya besarnya, mereka akan mengeshare di media sosial. Islamabad juga sangat ketat, dikontrol penuh oleh militer.

Sedangkan Hizbut Tahrir secara resmi tahun 2011 mulai dilarang, sebab mereka melakukan gerakan menyentuh politik langsung. Mengenalkan khilafah dan nyinyir terhadap sistim pemerintahan yang sedang berlangsung. Sebenarnya dari aspek keagamaan dan fiqhiah relatif sama dengan yang ada di masyarakat, sampai kemudian mereka melakukan tindakan bersenjata, akhirnya resmi dilarang. Polarisasi kekerasan berbasis aliran keagamaan bisa terjadi di semua tempat, semua penjuru Pakisata. Dengan kara lain empat suku besar, Pahtun, Panjabi, Sind, dan Balucistan, tidak dapat

langsung dilekatkan pada satu sekte, mazhab dan aliran karena penganut Brelwi, Syiah, Sunni, Ahlul Hadits terdapat pada semua suku. Setiap etnis mengenal perbedaan ragam mazhab dan keagamaan.

Upaya untuk Mengurangi Ketegangan dan Kekerasan

Pemerintah merupakan unsur terpenting dalam hal menangani konflik antarwarga negara, Pakistan memiliki Kementerian Agama dan Kerukunan Antaragama (Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony). Secara umum kementerian ini bertugas memberikan pelayanan haji, Council of Islamic Ideology, dan urusan pendidikan madrasah. Tugas lainnya adalah urusan pelayanan terhadap peziarah yang datang dari luar Pakistan.

Untuk membangun kerukunan pemerintah dengan ditunjang oleh organisasi non pemerintah (NGO), misalnya Muslim Institute, melalui board chairman nya menjelaskan mereka awalnya adalah komunitas yang konsern pada ajaran Sultan Bahoo, seorang mursyid tarekat berpengaruh di Pakistan³⁰. Inisiasi kegiatan mulai dari debat antartokoh islam di berbagai tempat secara daring (online), sampai dengan kegiatan infiltrasi ke kegiatan keagamaan, misalnya forum tarekat. Mereka melakukan dialog menyebarkan kedamaian melalui sentuhan sufisme. Gerakan kampanye kedamaian

³⁰ FGD dengan Muslim Institute. Taheer Mahmood dkk.

melalui sufisme ini belum dapat dijelaskan hasil-hasilnya dalam relasi sosial dapat memecahkan kebuntuan antarsekte. Pakistan memiliki keinginan yang sama terhadap masa depan yang lebih baik.

Dampak Pemisahan dengan India

Alasan utama pemisahan tentu saja Ideologi, tidak melihat dari aspek ekonomi dan budaya. Pakistan meyakinkan dirinya sebagai tempat tinggal bagi kaum muslim. Sebab minimnya pertimbangan ekonomi tersebut, Pakistan gagal berkompetisi dalam pembangunan terutama ekonomi, bahkan muncul konflik berkepanjangan sehubungan dengan daerah kaysa, Kashmir adalah wiayah yang sangat potensial dari berbagai aspek tetapi mengalami peperangan yang merusak dan belum berakhir antara India dan Pakistan.

Problem politik juga tidak kalah seriusnya, konflik antarpetinggi militer sejak meninggalnya Jenderal Ziaul Haq yang dicurigai dilakukan oleh dua pilotnya, meskipun tidak cukup bukti tetapi dugaan pilot dan co pilot bersimpati kepada kelompok Syiah yang baru dibantai di Rawal Pindi dan di Afganistan.

Kelompok suku di Bengalore merasa diabaikan, bahkan setelah Iqbal sebagai penggagas *two state nation* tidak dibenahi oleh pelopor pendirian negara setelahnya. Pada akhirnya Pakistan bagian timur (East Pakistan)

memisahkan diri menjadi Bangladesh, itupun dengan perjuangan yang berdarah juga.

Secara ekonomi, Pakistan adalah pasar potensila, sangat berpotensi karena jumlah penduduknya yang banyak dan pola konsumsinya yang besar, terutama sebagai konsumen daging terbesar, hal tersebut juga yang memicu konflik. Saat pemutusan berpisah, tidak semua daerah di India menjadi negara Pakistan meskipun secara jumlah mayoritas. Penganut Islam di India menjadi minoritas, banyak pihak di India mengatakan tidak semestinya Sub Kontinen Pakistan menjadi negara sendiri. Karena bagaimanapun, sepanjang sejarah India, muslim adalah penakluk dan penguasa di kontinen tersebut, akhirnya menjadi semakin lemah karena pemisahan. Sejarah India tidak bisa menghapus catatan tentang dinasti Mughal, banyak sekali peninggalan Islam di sana tidak bisa diselamatkan, di semua kontinen ada peninggalan Mughal.

Pada umumnya perpecahan diciptakan oleh penjajah, kalau bersatu sulit dikendalikan. Seperti juga dulu nusantara, mengalaminya, bangsa dengan kepulauan terbesar namun menjadi kecil dan lemah karena terpecah. Begitu juga dengan semua yang terjadi antara Pakistan dan India sangat bias dengan kolonialisme, perpecahan diciptakan agar tidak terlalu kuat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Khaled (2011) *Sectarian War: Pakistan's Sunni-Shia Violence and its links to the Middle East*. Oxford University Press. UK
- Bajwa, W. Khalid., Khan, Ali (2013) *Urban Pakistan: Frames for Reading and Imagining Urbanism (Oxford in Pakistan Readings in Sociology & Social Anthropology)* 1st Edition. Oxford University Press. UK
- Jaffrelot, Christophe (2016) *The Pakistan Paradox: Instability And Resilience*. Vintages Books. UK
- Lieven, Anatol (2012). *Pakistan A hard Country*. Penguin Group. London
- Marsden, Magnus (2012) *Islam and Society in Pakistan: Anthropological Perspectives (Oxford in Pakistan Readings in Sociology & Social Anthropology)* 1st Edition. Oxford University Press. UK
- Rizvi, Arshad (2014) *The Political System of Pakistan: A Constitutional Study*. Paramount Books. Karachi Pakistan

PENANGANAN GERAKAN PAHAM KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI LEBANON

Anik Farida, Wakhid Sugiyarto, Achmad Rosidi

Kondisi Sosial Keagamaan Lebanon

Gerakan keagamaan yang populer disebut dengan gerakan keagamaan transnasional di Lebanon adalah Syi'ah, Hizbut Tahrir, Salafi Wahabi, dan Jama'ah Islamiyah. Jika melihat sekte/kelompok keagamaan yang ada, semua memiliki pendukung signifikan. Di kalangan Muslim ada Syi'ah Hezbollah, Syi'ah Amal, Syi'ah Alawit dan Syi'ah Druz, Salafi Wahabi, Hizbut Tahrir, Jama'ah Islamiyah, Ikhwanul Muslimin. Sementara itu di kalangan Kristen ada Maronit, Ortodok Yunani, Katolik Yunani, dan Kristen Armenia.

Semua kelompok ini memiliki wakil di parlemen. Secara ideologis dan sosial keagamaan, masyarakat Lebanon memiliki keragaman sungguh sangat beragam dan seluruhnya mendapatkan posisi secara proporsional dalam kehidupan sosial politik, meskipun secara garis besar ada tiga kelompok besar yang menguasai dunia politik Lebanon, yaitu Kristen, Sunni dan Syi'ah. Ketiga kelompok besar itu secara konvensional menyepakati posisi politik didasarkan pada perjanjian tak tertulis

1943. Kesepakatan tidak tertulis itu didasarkan pada hasil sensus penduduk di tahun 1932, yang saat ini sudah tidak relevan.

Dalam kesepakatan tak tertulis itu Kristen selalu yang menjadi Presiden, Sunni yang selalu menjadi perdana menteri dan Syi'ah yang selalu menjadi pimpinan parlemen. Sementara itu keanggotaan di parlemen terbagi dalam dua kelompok besar yaitu Kristen dan Islam (Syi'ah dan Suni). Ada kondisi yang mengarah pada keinginan merubah kesepakatan itu, terutama dikalangan muslim karena merasa tidak puas dengan kesepakatan tak tertulis yang sudah ada itu. Kaum Muslim menghendaki adanya sensus penduduk ulang sesuai realitas sekarang, karena hasil sensus tahun 1932 dipandang tidak lagi relevan. Dalam jumlah wilayah dan penduduk misalnya, Syi'ah dan Suni merasa jauh lebih besar dari pada umat Kristen. Syi'ah dan menguasai konsentrasi lebih dari 2/3 wilayah Lebanon. Tetapi kaum Kristiani menolaknya, karena mereka tahu dan dikhawatirkan posisi politiknya akan berubah dari yang selama ini telah menguntungkan kelompok Kristen. Jumlah konsentrasi wilayah yang didominasi Kristen seluruhnya hanya sekitar 20% saja. Jadi potensi konflik politik Lebanon di masa depan sangat mengkhawatirkan.

Dalam kegiatan benchmarking di Lebanon ini yang menjadi fokus kajian adalah gerakan keagamaan Syi'ah dan Hizbut Tahrir. Gerakan keagamaan transnasional Syi'ah telah menjadi trend baru dalam kehidupan

keagamaan kaum Muslim di seluruh dunia. Di Lebanon populasi penganut Syi'ah dan Sunni dalam jumlah yang berimbang.

Akan tetapi sudah dimaklumi, secara *defacto Syiah* di Lebanon memiliki kekuatan politik dan sayap militer. Kekuatan militer Hizbullah di Lebanon sering berhadapan dengan militer Israel. Hizbullah sering terlibat dalam berbagai perang di Timur Tengah .

Keseluruhan operasi perang Hizbollah ini mendapat bantuan finansial dan berbagai senjata canggih dari Pemerintah Iran (sama-sama Syi'ah Atsna Asyariyah). Dalam rangka memertajam studi, maka penelitian ini akan melihat bagaimana kebijakan pemerintah terhadap gerakan keagamaan transnasional dan bagaimana respon gerakan keagamaan transnasional (HT dan Syi'ah) terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah terhadap gerakan keagamaan transnasional dan bagaimana respon gerakan keagamaan transnasional (HT dan Syi'ah) terhadap kebijakan pemerintah. Deskripsi yang diperoleh itu akan dibandingkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap gerakan keagamaan transnasional.

Sejarah, Sistem Politik dan Keberagamaan

Perjalanan sejarah Lebanon telah melalui era di masa lampau yang panjang, yakni era pra-sejarah, era

rezim Romawi, era kekuasaan Daulat Islam dan masa penjajahan Perancis. Pergeseran penguasaan Lebanon oleh berbagai rezim itu membawa Lebanon pada keberagaman masyarakatnya, dan semua diakui dan berhak untuk hidup di Negara Lebanon.

Pada era Romawi dan masa kolonialisasi Perancis telah menjadikan agama Kristen tersebar luas di seantero wilayah Lebanon. Pada zaman Daulat Islam (Umayyah, Abbasiah, Mamluk dan Turki Ustmani), Islam mendominasi sebagai bilangan mayoritas agama yang dianut penduduk Lebanon. Era Daulat Islam, masing-masing baik Sunni maupun Syi'ah juga telah memiliki pengaruh dan dapat dilihat hingga saat ini.

Kondisi sosial masyarakat Lebanon dapat dikategorikan berdasarkan sekte-sekte keagamaan. Terdapat aliran-aliran dengan berbagai sekte, diantaranya Islam (Sunni, Syiah, Druze dan Alawit), Kristen (ortodoks Romawi, Ortodok Yunani, Yunani, Kaldea, Maronite, Protestan dan Armenia) dan Yahudi. Sementara itu, pembagian masyarakat berdasarkan pada etnis terbagi menjadi Arab, Armenia dan Kurdi.

Terjadinya berbagai perang yang pernah berkecamuk di Lebanon dapat dikatakan tidak lepas dari adanya keberadaan etnis dan aliran/sekte keagamaan itu. Fakta yang terjadi dan dapat dilihat hingga kini adalah di tingkat elit terdapat pembagian penyelenggaraan pemerintahan, sementara di tingkat masyarakat bawah

(grassroot) adanya *enclave* tempat tinggal atau wilayah penduduk berdasarkan etnis atau aliran/sekte itu.

Namun demikian, meski berdasarkan sektarian masyarakat Lebanon sangat terbuka pada pergaulannya mengingat kondisi geografis negeri ini yang sangat strategis karena berada di kawasan daratan Arab yang agamis di satu sisi, dan berada di persimpangan budaya Asia dan Eropa yang terbuka dan kehidupan modern di sisi yang lain. Dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Lebanon dapat dikatakan sangat tinggi, di mana masyarakat yang melek huruf mencapai lebih dari 86% dibanding negara Arab lainnya.

Pendidikan dasar selama 9 tahun wajib bagi seluruh rakyat, semua dibiayai negara. Perguruan tinggi ternama berdiri di Lebanon seperti AUB (American University of Beirut), Saint Joseph University (dikelola oleh serikat Jesuit), Lebanese University (Pemerintah), Lebanese Arab University (kerjasama dengan Mesir), Lebanese American University dan American Haganz College. Tahun 2009, Lebanon menempati urutan 83 index tingkat pendidikan masyarakat dari 182 negara di dunia.

Penduduk Lebanon berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab yang merupakan bahasa resmi negara. Selain itu juga menggunakan bahasa Perancis karena notabene Perancis pernah menduduki Lebanon sebagai daerah jajahan kurang lebih 20-an tahun. Bahasa Inggris juga mulai populer, terutama di kalangan akademisi (terpelajar). Perancis inilah

nampaknya yang mewarnai wajah Lebanon sebagai sebuah negara mandiri yang lepas dari kekuasaan Suriah (wilayah Syam di masa Ottoman), sebagai representasi kehidupan masyarakat yang konsumtif, modern dan sangat menikmati suasana masyarakat urban Eropa.

Kondisi itu dapat dilihat cara berpakaian masyarakatnya, pusat-pusat perbelanjaan yang berdiri cukup mewah, banyaknya tempat-tempat hiburan (café dan *nightclub* yang hampir semua menyediakan *wine*), hotel-hotel berbintang dan arena perjudian sangat banyak mencirikan sebagai *urban state* bernuansa Eropa. Tidak heran, Lebanon sebelum pecahnya perangsaudara mendapat julukan Paris-nya Timur Tengah.

Agama yang dianut oleh masyarakat Lebanon yakni Islam dan Kristen. Dari kedua agama ini muncul faksi-faksi sekte keagamaan yang banyak jumlahnya. Penduduk muslim dan kristiani dapat hidup bersama secara damai di negeri ini. kerukunan umat beragama menjadi hal menarik menjadi cirikhas Lebanon di banding negara-negara Arab lainnya yang umumnya sering muncul gesekan. Lebanon nampaknya sangat bangga, karena diantara negara-negara Arab yang lain, mereka adalah satu-satunya negara yang dapat menjaga hubungan harmoni penganut Islam dan Kristen secara berdampingan.

Dari kedua agama besar itu, terpecah menjadi beberapa sekte-sekte. Masyarakat muslim terbagi menjadi Sunni, Syiah, Druze dan Alawith. Sementara

Kristen terdapat Maronit, Anglikan, Protestan, Ortodoks, Katolik dan Armenian. Terdapat pula penganut Yahudi meski dalam jumlah yang sedikit.

Faksi-faksi keagamaan Islam yang populer di Lebanon adalah Syi'ah, Hizbut Tahrir, Salafi Wahabi, dan Jama'ah Islamiyah. Masing-masing faksi memiliki basis pendukung yang signifikan. Kelompok Islam terdiri Sunni dan Syiah. Syiah terdiri dari empat faksi besar yaitu Hizbullah, Alawiyin dan Amal. Sementara sunni terdiri dari Salafi Wahabi, Hizbut Tahrir, Jama'ah Islamiyah dan Ikhwanul Muslimin. Di sisi lain, kelompok itu di kalangan Kristen ada Kristen Maronit, Ortodok Yunani, Katolik Yunani, dan Kristen Armenia.

Semua kelompok ini memiliki wakil di Parlemen. Jadi secara keagamaan, keragaman masyarakat Lebanon sungguh sangat beragam dan seluruhnya mendapatkan posisi secara proporsional dalam kehidupan politik, meskipun secara garis besar ada tiga kelompok besar yang menguasai dunia politik Lebanon, yaitu Kristen, Sunni dan Syi'ah. Ketiga kelompok besar itu secara kolektif menyepakati posisi politik didasarkan pada perjanjian tak tertulis 1943. Kesepakatan tak tertulis itu didasarkan pada hasil sensus penduduk di tahun 1932.

Ada kondisi yang mengarah pada keinginan merubah kesepakatan itu, terutama di kalangan muslim karena merasa tidak puas dengan kesepakatan tak tertulis yang sudah ada itu. Kaum Muslim menghendaki adanya sensus penduduk ulang sesuai realitas sekarang,

tetapi kaum Kristiani menolaknya, karena dikhawatirkan posisi politiknya akan berubah dari yang selama ini telah menguntungkan Kristen.

Kondisi sosial masyarakat akibat terjadinya perang berkali-kali menjadikan masyarakat belajar dan introspeksi. Perang saudara terjadi tahun 1975 sampai tahun 1990 telah memporak porandakan negeri yang dikenal dengan Paris-nya Timur Tengah ini. Korban akibat perang ini diperkirakan mencapai 150.000 orang menyebabkan masyarakatnya eksodus ke luar negeri dan memilih sebagai diaspora.

Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang tinggal secara diaspora itu mencapai 14 juta, sementara jumlah penduduk yang tinggal di Lebanon diperkirakan mencapai 4 juta jiwa. Masyarakat Lebanon merindukan adanya tatanan negara yang demokratis dan mempersatukan rakyat Lebanon menjadi bangsa yang memiliki kebersamaan dan rasa saling memiliki. Mengakhiri perang itu, pada tahun 1989 perwakilan partai-partai politik dan sekte-sekte keagamaan yang terlibat dalam perang saudara itu melakukan rekonsiliasi nasional yang dikenal dengan Taif Agreement.

Kesepakatan Taif ini ditempuh sebagai solusi mengakhiri perang saudara yang telah berlangsung selama lima belas tahun itu. Kesepakatan Taif melahirkan pembentukan sistem pemerintahan berdasarkan tujuan yang mengakomodir sekte-sekte keagamaan itu yang dikenal dengan istilah Troika.

Kepala Negara oleh Presiden, diberikan kepada golongan Kristen.

Kepala Pemerintahan dikendalikan oleh Perdana Menteri diberikan kepada golongan Muslim Sunni, sementara Parlemen dipimpin oleh Ketua Parlemen dipegang oleh Muslim Syiah. Kesepakatan inilah yang telah memadamkan perang. Lebanon kemudian memasuki kehidupan politik demokrasi dengan kondisi berbeda dari demokrasi yang berkembang di negara-negara lain.

Sebagai negara republik yang menganut demokrasi pasca Taif Agreement, penyelenggaraan negara yang didasarkan pada *power sharing system* itu jabatan tertinggi dibagi secara proporsional yang mewakili komunitas sekte-sekte agama. Konstitusi Lebanon mengamankan bahwa pemilihan anggota parlemen diselenggarakan setiap empat tahun. Akan tetapi mekanisme itu terakhir diselenggarakan terakhir pada tahun 2009 dan belum pernah dilaksanakan pemilihan kembali.

Kondisi politik di Lebanon tidak dapat lepas dari perkembangan di dunia Arab lainnya. Krisis politik yang kerap muncul di dalam negeri lebih disebabkan oleh buntunya proses demokrasi seperti tidak berjalannya agenda pemilu, parlemen gagal memilih presiden dan kontestasi tidak sehat oleh partai-partai politik yang ada. Di sela-sela "kebuntuan" proses demokrasi itu diperparah dengan adanya serangan dan aksi anarkis seperti yang terjadi pada 14 Februari 2005 yang

menyebabkan terbunuhnya PM Rafiq Hariri. Kebuntuan itu dipicu oleh fanatisme sektarian menyebabkan konflik yang sangat rumit. Isu Sunni-Syiah masih mendominasi di Lebanon dengan adanya dugaan keterlibatan masing-masing negara pendukung keduanya.

Sunni ditengarai mendapatkan sokongan dari Saudi Arabia dan Syiah memperoleh dukungan dari Iran. Partai Hizbullah yang diisi oleh kaum Syiah memiliki para militer dengan persenjataan modern yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan dikatakan bahwa militer pemerintah tidak sebanding dengan militer yang dimiliki oleh Hizbullah. Kepemilikan senjata militer Hizbullah yang pro-Iran ini, dengan alasan untuk menahan dan melakukan tindak balasan atas aksi penyerangan Israel terhadap Lebanon.

Pengaruh dari luar negeri yakni adanya Arab Spring yang dimulai dari Tunisia, Libya, Yaman dan Suriah mewarnai konstelasi politik di kawasan jazirah Arab secara keseluruhan. Arab spring dipandang sebagai kemunculan suksesi, demokratisasi menyebar sebagai efek domino negara-negara di kawasan timur tengah. Arab spring ditandai dengan kemunculan konflik bersaudara. Konflik yang hingga saat ini masih berkecamuk adalah di Suriah. Lebanon sebagai sebuah negara yang masih satu kawasan dengan wilayah Syria terkena dampak langsung dengan adanya banyak para pengungsi yang mencari perlindungan ke Lebanon.

Lahirnya demokrasi di kawasan Timur Tengah secara umum, dan secara khusus di Lebanon tidak diterapkan secara terbuka. Demokrasi yang lahir bukan sistem yang mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan diberikannya jaminan kebebasan kepada seluruh warga negara. Demokrasi di Lebanon khususnya muncul atas kompromi partai-partai untuk sistem penyelenggaraan negara oleh eksekutif dan legislatif.

Rakyat Lebanon merasakan kegetiran dan masa pahit selama terjadinya perang saudara yang diantaranya disebabkan konflik Sunni dan Syiah. Perang saudara itu sering dikaitkan dengan adanya perang yang terjadi di Syiria yang juga disebabkan Sunni versus Syiah. Kekuatan besar pendukung dominasi Sunni-Syiah yang hingga kini masih berkecamuk melanda Lebanon. Itulah fenomena yang ada, saling klaim, saling mengintai dan waspada jika tiba-tiba terjadi serangan.

Persoalan yang ada di Lebanon baik politik dan agama, tidak lepas dari pengaruh geopolitiknya yang menjadi bagian dari kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, yakni persoalan perang Arab melawan Israel. Di sisi lain terjadinya konflik Sunni-Syiah yang juga belum menemukan jalan keluar yang benar-benar memberikan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh kawasan. Jargon demokrasi masih melalui perjalanan panjang hingga dapat diwujudkan dengan baik di seluruh kawasan Timur Tengah.

Orang Suriah tidak pernah menyebut negeri mereka dengan Syria, tetapi dengan istilah Syam. Syam di masa lampau meliputi wilayah Syria, Lebanon, Yordania dan Palestina/Israel. Sementara orang luar Suriah (termasuk pengamat) menyebut Suriah, bukan Syam untuk menyebutkan dan membatasi masing-masing wilayah yang terlepas dari Suriah yakni Lebanon, Yordania dan Palestina/Israel. Konflik yang melanda Suriah turut andil mempengaruhi kondisi dalam negeri Lebanon.

Gerakan Hizbut Tahrir dan Syiah Itsna Asy'ariah

Gerakan Hizbut Tahrir

Hizbu Tahrir sebagai sebuah kelompok gerakan keagamaan bermadzhab Sunni di Lebanon telah ada sejak tahun 1953. Hizbut Tahrir di Lebanon didirikan langsung oleh Taqiuddin al-Nabhani setelah dirinya mendirikan Hizbut Tahrir di Palestina, dan diusir oleh otoritas Yordania dan kemudian bermukim di Lebanon. Negeri ini lebih liberal dibanding negara-negara lainnya yang kebanyakan menolaknya secara keras. Di Lebanon, HT seperti mendapatkan tempat meski sempat memperoleh penolakan di tahun 2006. Tetapi penolakan tersebut dicabut atau setidaknya tidak dilarang lagi untuk tumbuh kembali.

Hal ini adalah karena Perdana Menteri Hariri ingin memperkuat posisi kaum Sunni di hadapan kaum Syi'ah yang semakin populer. HT melihat Lebanon sebagai

sebuah negara demokrasi yang memberikan kebebasan berbicara dan berserikat kepada warganya, namun fungsi-fungsi demokrasi tidak berjalan dengan sepenuhnya.

Keberadaan Hizbut Tahrir sebagai gerakan Islam pernah menimbulkan kekhawatiran di Lebanon menjadi lebih aktif di panggung politik di negeri ini. Pada tahun 1959 akibat larangan pemerintah Lebanon pada kelompok berhaluan sosialis, HT sempat kena getahnya sebagai organisasi yang dilarang dan gerakannya diawasi secara ketat oleh pemerintah, bahkan kemudian dilarang. Alasan pemerintah, HT memiliki visi dan misi organisasinya yang tidak sejalan dengan ideologi negara yaitu tegaknya sistem khilafah dan Syari'ah Islam. Kala itu aktivisnya sempat ditangkap meski kemudian dibebaskan. Pada bulan April 2011 contohnya, aparat pemerintah Lebanon sempat menangkap aktivis HT atas aksi demonstrasinya di Tripoli (Lebanon Utara) yang menyuarakan segera dilakukannya "revolusi Syam" dan sikap penolakan terhadap rezim Suriah.

Basis kekuatan HT berada di pinggiran kota berpenduduk ekonomi masyarakat bawah. Dalam konstelasi politik di Lebanon, Hizbut Tahrir telah meningkatkan aktivitasnya di Lebanon, khususnya di Lebanon utara setelah tahun 2005. Pamor HT sempat naik di tengah melemahnya beberapa negara Arab akibat konflik politik dan sektarian dan juga pengaruh Arab spring. Ideologi yang diusung yaitu tegaknya kekhilafahan, tegaknya syari'ah Islam bagi umat Islam

dan penolakannya terhadap berbagai tindak kekerasan dan budaya Barat. HT memiliki misi diantaranya mengusung kebebasan Arab dari dominasi asing dan termarginalisasinya Arab di berbagai bidang.

Hizbu Tahrir menyikapi setiap kebijakan pemerintah secara pasif dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Bahkan, dalam beberapa statemennya HT mengancam aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di Lebanon. Hizbut Tahrir sebagai organisasi internasional ingin menegakkan sistim kekhilafahan, dalam misinya juga memperhatikan masalah-masalah nasional. Dengan begitu HT memperoleh simpati massa dalam negeri.

Kebijakan pemerintah Lebanon kepada HT sepanjang sejarah di negeri ini sempat diberlakukan pelarangan. Namun pelarangan dimaksud tidak tertuang dalam regulasi dikeluarkan oleh pemerintah baik UU atau peraturan pemerintah,serta tidak melalui proses peradilan. Larangan tersebut masih berwujud seperti maklumat. Hal itu karena HT dalam geliat aktivitas misi dan visinya bergerak dalam wacana pemikiran dan belum terealisasikan dalam sebuah kelompok yang membahayakan, bahkan sama sekali tidak mempersenjai diri sebagai sebuah gerakan revolusioner. Pada perang sipil tahun 1975, HT mengklaim tidak turut angkat senjata dalam perang tersebut selain senjata yang dimiliki untuk membela dirinya. HT tidak mendukung pada salah satu pihak yang bersengketa.

Mensikapi konflik antara Lebanon dengan Israel, Hizbut Tahrir menunjukkan sikap yang ambigu. Konfrontasi Lebanon melawan Israel yang dikomandani oleh Hezbollah memperoleh simpati rakyat, namun di sisi lain terdapat perbedaan tujuan dari kedua kelompok tersebut. Hezbollah yang memiliki konsep imamah dan wilayatul faqih, sebaliknya HT memiliki konsep tegaknya kekhalifahan. HT juga berpandangan bahwa Hezbollah dan Iran memiliki agenda untuk menguasai Lebanon dan kawasan Syam. Perlawanan Hezbollah pada Israel bagi HT Lebanon merupakan upaya yang tidak efektif, karena tujuan dari perlawanan tersebut tidak sejalan dengan harapan umat, terutama muslim Sunni yang ada di Lebanon dan Suriah. Jadi hal ini memperlihatkan ketidaksukaan HT terhadap Hezbollah yang telah mengusir Israel dari Lebanon Selatan. Mungkinkah HT lebih senang keberadaan Israel di Lebanon daripada diusir jauh ke negara mereka sendiri.

Gerakan Syiah

Kelompok Syiah yang tumbuh berkembang besar dan kuat di Lebanon memiliki organisasi yang rapi dengan disiplin tinggi, yaitu Hezbollah. Kekuatan yang dimiliki Hezbollah yakni dia sebagai organisasi politik dan paramiliter. Hezbollah didirikan pada tahun 1982 dan mempunyai pengaruh besar dalam politik Lebanon. Selain itu, Hezbollah memberikan pelayanan sosial, mendirikan sekolah-sekolah, rumah sakit, membuka

daerah pertanian serta pelayanan lainnya untuk ribuan warga Syiah Libanon. Semenjak tahun 1982 Hezbollah mendapatkan legalitas dalam memberikan perlawanan terhadap penjajah Israel di Lebanon hingga sukses mengusir Israel dari Lebanon Selatan tahun 2000.

Kekuatan politik Hezbollah di Lebanon termasuk sangat diperhitungkan dan sangat signifikan. Hal inilah nampaknya yang menjadikan problematikan sektarian di Lebanon belum dapat dikatakan kapan akan berakhir dari konflik. Kelompok Sunni yang juga memiliki bagian besar di pemerintahan dan politik turut memberikan warna kebijakan pemerintah Lebanon. Perseteruan Sunni dan Syiah seperti samudera tiada tepi.

Kesimpulan

Dari deskripsi singkat di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pemerintah Lebanon tidak memiliki regulasi tentang ormas dan gerakan keagamaan, sehingga ketika membubarkan gerakan atau ormas keagamaan cukup dengan maklumat Perdana Menteri saja. Hal ini pernah menimpa HT yang dibubarkan cukup dengan maklumat Perdana Menteri saja; Hizbut Tahir yang di Lebanon tahun 1953 setelah beberapa bulan berdiri di Palestina, pernah dilarang meskipun tidak menggunakan proses peradilan dan tidak didasarkan pada undang-undang (regulasi).

Di Lebanon tiak ada regulasi yang mengatur gerakan dan ormas keagamaan. HT dilarang tahun 2006 karena mewacanakan tegaknya Khalifah dan Syari'at Islam di Lebanon. Tetapi kemuian dibiarkan hidup lai, karena Harisi berkepetingan untuk memperkuat kaum Suni dihadap kaum Syi'ah yang semakin populer; Syi'ah yang di Lebano sudah ada sejak lama, mendirikan Hezbollah di tahun 1983 dan posisinya semakin populer. Syi'ah ini menguasawi hampir 2/3 wilayah Lebanon. Selama ini tidak ada larangan terhadap Hezbollah, bahkan Syi'ah menguasai parlemen dan pimpinannya juga dari Syi'ah.

PENANGANAN PAHAM GERAKAN KEAGAMAAN TRANSNASIONAL DI BRUNEI DARUSSALAM

Suhanah & Fauziah

Kondisi Geografis

Paham dan gerakan keagamaan transnasional terus tumbuh dan berkembang sampai hari ini. Paham dan gerakan keagamaan transnasional hidup di berbagai negara (mayoritas dan minoritas) muslim. Paham yang kemudian mengejawantah menjadi sebuah gerakan tersebut sebagian melakukan aksi dakwah dan sebagian lagi melakukan gerakan politik keagamaan dengan wacana dan ideologi tersendiri menawarkan solusi bagi umat.

Eksistensi gerakan keagamaan transnasional juga berkembang dan terus mengembangkan pengaruhnya. Meskipun diantara gerakan itu dalam banyak hal kontradiktif dan juga saling menyesatkan, tetapi mereka memiliki agenda yang sama yaitu kebangkitan Islam dan anti Barat. Oleh karena itu pemerintah harus mensikapi, baik dalam bentuk menjaga eksistensi ataupun melarangnya menjadi sangat penting.

Indonesia merupakan negara paling demokratis di seluruh negara Islam terutama dalam hal gerakan paham keagamaan. Berbeda halnya dengan negara Brunei,

negara ini merupakan kerajaan monarki absolut. Sultan selain menjabat sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan.

Kesultanan Brunei secara tegas menyatakan ia adalah kerajaan Islam yang beraliran Ahlu Sunnah wal Jamaah dan bermazhabkan Syafi'i dan memiliki falsafah Melayu Islam Beraja (MIB). Negara Brunei melarang secara tegas berkembangnya paham keagamaan selain yang diakui oleh negara.³¹ Untuk membentenginya dari paham keagamaan yang lain, Negara Brunei memberikan pendidikan agama mulai dari tingkat Sekolah Rendah sampai Universitas dengan satu kurikulum dari negara.³²

Serbuan budaya asing dari paham keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam tidak hanya menjadi kecemasan masyarakat muslim Indonesia saja, melainkan negara Brunei Darussalam juga merasakannya. Mereka mengungkapkan keresahannya dan prihatin dengan gencarnya budaya asing dan maraknya perkembangan paham keagamaan transnasional saat ini, terutama dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.³³ Untuk itu negara Brunei telah melakukan usaha dengan mengIslamkan beberapa

³¹Wawancara dengan Hal Ehwal Ugama, pada tanggal 27 November 2017

³²Wawancara dengan Hal KUPU, pada tanggal 28 November 2017

³³ Wawancara dengan Kementyeriasnm Hal Ehwal Ugama

hukum dengan memasukkan syariat Islam diantaranya hukum mu'amalah dan jinayah.³⁴

Istilah transnasionalisme pertama kali muncul pada abad ke 20 untuk menggambarkan cara pemahaman baru tentang hubungan antar kebudayaan. Ia adalah sebuah gerakan sosial yang tumbuh karena meningkatnya interkoneksi antara manusia di seluruh permukaan bumi dan semakin mudarnya batas-batas negara. Perkembangan telekomunikasi, khususnya internet, migrasi penduduk dan terutama globalisasi menjadi pendorong perkembangan transnasional ini.

KH. Husein Muhammad (Pengasuh Pondok Pesantren Daarut Tauhid), menyatakan bahwa Idiologi Islam Transnasional artinya adalah sebuah ideologi yang ingin disebarkan diseluruh dunia dengan suatu konsep tertentu. Dan ia melihat bahwa apa yang disebut ideologi Islam transnasional itu adalah Ideologi Islam Khilafah, yaitu Islam yang biasanya disebut Islam Radikal. Selain itu ia menyatakan bahwa sumber ideologi Islam Transnasional adalah sebuah pengulangan belaka dari sebuah ideologi besar yang pernah lahir di tengah-tengah umat Islam, yaitu kaum khawarij. (<https://www.Slideshare.Net/prabumalwapati/transnasional>).

Gerakan keagamaan transnasional yang sebagian melakukan gerakan dakwah dan purifikasi terhadap praktek keagamaan masyarakat lokal yang dianggap

³⁴ Wawancara dengan Ketua Mufti

sinkretik. Sebagian yang lain melakukan gerakan politik keagamaan dengan wacana khilafah atau imamah dan syari'at sebagai solusi kemanusiaan dan keumatan. Gerakan keagamaan transnasional dimaksud adalah Salafi, Syi'ah, Jama'ah Tabligh, Ikhwanul Muslimin (IM) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Negara adalah aktor dominan dan aktor paling kuat dalam berinteraksi melakukan hubungan internasional. Negara adalah subyek, pelaku, dan pemain tunggal yang dominan dalam melakukan hubungan internasional.

Dalam Teori Statecentris aktor lain selain negara (non state actor) dianggap sebagai aktor hubungan internasional yang berperan sebagai "figuran" yang kurang memiliki peran dominan dalam forum internasional. Aktor utama dalam hubungan internasional adalah aktor negara yang terepresentasikan dalam badan pemerintah / organ-organ pemerintahan. Isu yang berkembang dalam hubungan internasional adalah isu keamanan dan militerisme sehingga mendorong peranan aktor negara yang kuat.

Profil Brunei Darusalam

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil dengan sistem *monarchi* yang memegang teguh kebudayaan melayu. Negara ini merdeka secara penuh pada tanggal 1 Januari 1984. Sesudah merdeka, Brunei Darussalam termasuk salah satu negara kecil di dunia yang menduduki peringkat ke 5 dari 182 negara termakmur di dunia. Kemakmuran negara ini

menjadikan negara ini memiliki stabilitas dalam bidang ekonomi dan politik. Negara Brunei melakukan upaya dalam penyebaran syiar Islam, termasuk dalam suasana politik yang masih baru. Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negaranya. Kekayaan negara ini berasal dari penjualan minyak buminya.

Jumlah penduduk Brunai Darussalam beradsarkan data statistik sekitar 422.678 jiwa, dari jumlah tersebut 80.000 orang berasal dari Indonesia. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Buddha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya sekitar 10 persen. Sebagian besar penduduknya merupakan keturunan Melayu, sisanya adalah keturunan Cina dan India. Penduduk Brunei dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Melayu, Inggris dan Cina. Bahasa melayu dijadikan bahasa nasional. Adapun jumlah rumah ibadah berupa masjid sebanyak 118 buah; 2 buah Gereja dan 1 buah Tepekong. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi empat (4) kampung, yaitu: 1) Kampung Brunei; 2) Kampung Tutong; 3) Kampung Kuala Blait; dan 4) Kampung Tumborong. Adapun batasan wilayah negara Brunai adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Timur : Serawak Malaysia
- Sebelah Selatan : Serawak Malaysia
- Sebelah Barat : Serawak Malaysia

Indonesia dan Brunai memiliki banyak kesamaan dan ciri-ciri karakteristik dari segi sejarah, budaya dan agama. Kedua negara ini termasuk sebagai negara mayoritas muslim, dimana penduduknya menganut agama Islam dengan Mazhab Syafii. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunai telah memastikan konsep "Melayu Islam Beraja" sebagai falsafah negara dengan seorang Sultan sebagai kepala negaranya. Brunei Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara dengan latar belakang sejarah Islam yang gemilang.

Sistim Politik dan Penanganan Keberagamaan di Brunei Darussalam

Kerajaan Brunei menganut ideologi kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam *Beraja* (MIB). Berbagai pertemuan dan acara seremonial ditutup dengan doa. Pada setiap acara kenegaraan, non-muslim diharuskan memakai pakaian nasional yang mencakup tudung kepala bagi perempuan dan kopiah bagi laki-laki, kostum yang relatif identik dengan busana muslim. Seperti yang ditegaskan oleh Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin wa Daulah mengawali tahun 1991: "Melayu Islam Baraja harus menegaskan identitas dan citra Brunei Darussalam yang kokoh ditengah-tengah Negara non-sekuler lainnya di dunia". Kerajaan Islam Melayu menyerukan kepada masyarakat untuk setia

kepada rajanya, melaksanakan Islam dan menjadikannya sebagai jalan hidup serta menjalani kehidupan dengan mematuhi segala karakteristik dan sifat sejati bangsa Melayu Brunei Darussalam.

Berdasarkan Perlembagaan Negeri Brunei 1959 ini ditetapkan bahwa agama resmi Negara Brunei adalah Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wa al-Jamaah dan bermazhab Syafii. Pasal 44 konstitusi ini menyebutkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, termasuk dalam urusan agama Islam. Untuk menjalankan tugasnya dalam bidang agama, Sultan dibantu oleh; Mufti, Majlis Ugama Islam Brunei, Jabatan Hal Ehwal Ugama.

Majlis Ugama Islam Brunei adalah sebagai penasihat Sultan dalam bidang agama yang meliputi: membuat UU, memberikan fatwa dan menetapkan peraturan per-Undang-Undangan buat orang Islam, mengurus masalah kehakiman, peradilan, menangani masalah-masalah amanah umat, masjid, perkawinan dan perceraian serta nafkah dan orang-orang masuk Islam. Sedangkan Penasihat Ugama (Mufti) tugasnya adalah membantu dan memberikan nasehat pada Sultan mengenai urusan agama Islam.

Jabatan Hal Ehwal Ugama adalah sebagai petugas pelaksana hal ehwal agama dalam negeri; seperti penyuluhan agama dan penyebaran agama Islam bagi penduduk negeri.

Pada tahun 1960-an politik Brunei berubah sehubungan dengan langkah yang diambil oleh Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj mengenai pembentukan Malaysia yang meliputi negeri-negeri persekutuan Melayu, Sabah, Serawak, Singapura dan Brunei. Brunei memisahkan diri dari persekutuan tersebut, sehingga Malaysia merdeka sendiri tahun 1963.

Tahun 1967 Hasanah Bolkuah dinobatkan menjadi Sultan menggantikan ayahnya, dan 1 Agustus 1968 beliau dilantik jadi Sultan. Pada awal tahun 1984 Inggris mengakhiri pengaruhnya di Brunei. Brunei kemudian mengumumkan bahwa mereka adalah negara Islam yang diatur menurut Syariah. Dewan Agama, kebiasaan negara dan UU Mahkamah Qadi 1955 menjadi lebih giat dilaksanakan, diikuti dengan peninjauan dan perubahan dalam bentuk Syariah dan pengaruh hukum Malaysia.

Gerakan keagamaan di Kerajaan Brunei Darussalam ini tidak nampak adanya. Hal ini dikarenakan negara melarang adanya gerakan paham keagamaan yang berkembang selain yang diakui oleh negara. Negara hanya mengikuti pada madzhab Syafi'i yang berpaham Ahlussunnah wal jamaah. Namun demikian, negara tidak menafikan adanya madzhab-madzhab lain seperti Hanafi, Hambali dan Maliki. Bagi yang mengamalkan madzhab lainnya diperbolehkan, tetapi dilakukan secara pribadi di rumahnya, tidak boleh disebarluaskan kepada masyarakat umum.

Negara Brunei walaupun hanya mengakui Islam satu-satunya agama resmi negara, namun bagi non muslim boleh merayakan hari besar keagamaannya, tetapi tidak boleh dinampakkan di depan khalayak ramai. Negara juga memberikan kesempatan kepada umat non muslim untuk memegang jabatan di pemerintahan seperti Kementerian Perdagangan. Begitu pula dengan toleransi antar umat beragama berjalan baik dalam arti tidak ada saling mengganggu.

Pemeluk agama lain hidup berdampingan secara damai. Hal ini terbukti belum pernah ada umat Islam yang merusak atau mengganggu rumah ibadah mereka. Menurut ketua Mufti mengatakan bahwa umat non muslim tidak boleh dizolimi bahkan mereka harus dilindungi, karena Islam adalah *rahmata lil 'alamiin*.³⁵ Mufti adalah penasehat Sultan dan dipilih oleh Sultan. Mufti memiliki empat bidang yaitu: 1) Bidang Fatwah; 2) Bidang ilmu secara keseluruhan; 3) Bidang Research; 4) Bidang Penerbitan. Jabatan Mufti adalah jabatan tertinggi negara dan memiliki staf sebanyak 100 orang. Tugas Mufti selain memberikan nasehat kepada Sultan mengenai urusan agama juga memberikan fatwa. Mufti sudah mengeluarkan seratus judul buku fatwa yang diterbitkan setiap tahun. Mufti di negara Brunei berbeda dengan Istilah MUI di Indonesia. Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang sama dengan MUI di Indonesia.

³⁵Wawancara dengan Mufti, Selasa, 28 November 2017).

MUIB bertugas melakukan sidang dalam satu bulan satu kali, menasihati Sultan dalam hal ikhwal ugama.³⁶

Ormas-ormas keagamaan Islam secara resmi tidak ada di negara ini, namun kenyataan di lapangan masih terdapat kelompok Jamaah Tabligh yang bermarkas di daerah Lambak Kanan Malay Masyhur dan di Kampung Putat Brunei. Gerakan keagamaan Islam Jamaah Tabligh ini memang berkembang di berbagai Negara seperti di Pakistan, Banglades, India dan Indonesia. Namun Jamaah Tabligh masuk ke Brunai sejak tahun 1920. Yang aktif 100 orang dan yang baru 4 bulan menjadi anggota sebanyak 300 orang.

Salah seorang pengikut Jamaah Tabligh yang ditemui adalah asli orang Brunai. Ia masuk Jamaah Tabligh sejak tahun 2014. Awalnya pada tahun 2004, ia didatangi rumahnya oleh orang-orang Jamaah Tabligh. Kemudian dia mempelajari ajaran Jamaah Tabligh selama tujuh tahun. Meskipun dia jamaah tabligh, tetapi Ia dibolehkan untuk berceramah di Masjid atas izin Kementerian Uga dan pernah melakukan khuruj ke India selama satu tahun.

Menurut keterangannya, pengikutnya kebanyakan berada di Kampung Putat dan Lambak Kanan. Adapun

³⁶(Wawancara dengan H. Awang Abdul Azis, (Ketua MUIB),).

proses persyaratan menjadi anggota Jamaah Tabligh adalah: sebelum masuk ke masjid terlebih dahulu berwudhu. Kemudian diberikan dakwah. dibrifing selama tiga hari oleh penanggungjawab. Setelah itu baru menjadi jamaah masjid. Setiap tahun Jamaah Tabligh melakukan seminar di Bangladesh dan setiap dua tahun sekali melakukan Mudzakah di India yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai negara.

Gerakan ini mengajak umat Islam untuk kembali ke nilai-nilai Islam awal seperti dicontohkan di masa Nabi. Mereka juga mewacanakan kembali ke Al-Qur'an dan Hadits, persaudaran muslim, syari'at Islam dan memakmurkan masjid. Jamaah Tabligh di Brunai memiliki lima orang penanggungjawab, mereka adalah: 1) H. Said; 2) H. Abu Bakar; 3) H. Jamiri; 4) H. Kamaluddin; dan 5) Pangeran Rajeh..

Tujuh hal yang boleh disampaikan oleh orang Jamaah Tabligh adalah:

1. Mentauhidkan Laa ilahailallah yang berarti Mengesakan Allah;
2. Shalat khusus yaitu sholat lima waktu dan sholat sunat berjamaah;
3. Ilmu dan dzikir yaitu menuntut ilmu dan melakukan zikir;
4. Ikromul Muslimin yaitu memuliakan orang-orang muslim;
5. Membetulkan Niat yaitu ikhlas dalam beramal;

6. Dakwah dan Tabligh yaitu mengajak manusia ke jalan yang baik dan benar;
7. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat yaitu meninggalkan perkataan maupun perbuatan yang tidak baik.

Ketujuh hal tersebut di atas tercantum dalam buku *Muntakhab Ahadits* yang dikarang oleh Syaikh Maulana Muhammad Yusuf, (2007: 15-669). Adapun buku-buku yang menjadi pegangan Jamaah Tabligh adalah:

1. Buku *Fadhoilul A'mal*;
2. *Muntakhab Ahadits*;
3. *Fadhilah Sedekah*;
4. *Hayatus Shahabah* (khusus dibaca oleh Ulama yang sudah melakukan *Khuruj* satu tahun dan dibaca setiap malam Jumat). Di Brunei ini baru ada tiga orang yang membaca kitab ini yaitu: 1) Ustadz Hamzah; 2) Maulana Ilham; dan 3) Maulana Amir Fadhil.
5. *Riyadushsholihin*
6. *Fadhillah Haji*, dilakukan di Mekkah selama 5 hari dan di Madinah selama 25 hari.

Pola hukum Islam yang dianut oleh penduduk Brunei lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Syafii. Sistem Hukum dan Pengadilan mereka lebih banyak

dipengaruhi oleh hukum adat Inggris Sampai dekade sekarang ini sistem hukumnya, kecuali hukum-hukum agama Islam. masih didominasi oleh sistem hukum Inggris. Pengadilan Syariah (Mahkamah Qadi) secara tradisional mengurus masalah- masalah perdata Islam (perkawinan, perceraian, hubungan keluarga, amanah masyarakat, nafkah dsb) berdasarkan mazhab Syafii. Sistem ini tetap dipertahankan sebagai pranata hukum dan politik Sultan.

Kerajaan Brunei mempunyai warisan sejarah tua yang berkaitan dengan sejarah tua kerajaan Melayu Islam, seperti Perlak, Pasai, Malaka, Demak dan Aceh. Puncak kekuasaannya adalah sekitar abad 15, Brunei telah menguasai tidak saja Borneo, bahkan sebagiankepulauan Pilipina termasuk Sulu. Rajanya yang pertama memeluk Agama Islam adalah Awang Alak Betatar, yang bergelar Sultan Muhammad Syah (1368)-1415).

Hukum Kanun Brunei berlaku sejak zaman Sultan Bolkiah (1473-1521). Zaman Sultan Saiful Rijal 1575-1600) di Brunei telah ada pengadilan terhadap orang- orang yang bersalah yang dihukum berdasarkan Hukum Kanun Brunei. Undang-Undang Malaka, semula terdiri dari 19 pasal, kemudian berubah menjadi 20 pasal dan terakhir menjadi 44 pasal, setidaknya-tidaknya 18 pasalnya diatur menurut ketentuan hukum Islam.

Kesimpulan

Negara Brunei melarang tegas adanya gerakan paham keagamaan selain yang diakui oleh negara. Negara hanya mengakui Islam sebagai satu-satunya agama resmi negara yang bermazhab Syafii dan berpaham Ahlus Sunnah Wal-Jamaah. Kurikulum pendidikan agama di sekolah dan teks khutbah untuk para penceramah diatur oleh negara. Jamaah Tabligh yang ada di Brunei berjumlah 300 orang dan mereka tidak diperbolehkan melakukan kegiatan di depan khalayak ramai hanya dibolehkan untuk menyampaikan ceramahnya pada anggotanya di surau. Negara Brunei memberikan hukuman yang tegas bagi orang-orang yang melanggar. Contohnya ada warga yang melihat-lihat Facebook tentang ISIS, kemudian orang tersebut langsung dicari dan diambil dimasukkan ke penjara.

PENUTUP

Pada bagian ini memiliki tugas berat untuk merumuskan studi pada tiga negara tersebut, awalnya kajian diarahkan untuk melihat negara yang jadi sasaran benchmarking berkarakteristik berbeda. Pakistan secara resmi melarang HT, kemudian mempersempit ruang geraknya di negara tersebut, begitu juga dengan Ahmadiyah mengalami perlakuan yang tidak lebih baik dari HT. Sedangkan pemeluk Syiah sedang terus berjuang untuk mendapatkan pengaruhnya kembali dalam banyak isu politik dan penerimaan secara sosial dan kultural.

Adapun Lebanon adalah negara yang membiarkan semua aliran keagamaan, begitu beragamnya aliran keagamaan khususnya Islam di negara tersebut membuat corak Lebanon cenderung menjadi negara kesepakatan. Hanya saja kemudian Hizbut Tahrir juga dilarang melakukan aktifitas di negara tersebut, melalui keputusan Perdana Menteri pada tahun 2006. Sebagai konsekuensi dari kesepakatan di Lebanon, diderivasikan pada tindakan politik *power sharing*, kekuasaan dibagi ke dalam tiga kelompok besar dan berpengaruh yaitu Islam Sunni, Islam Syiah dan Kristen.

Entitas kelompok bersenjata juga menjadi pertimbangan dalam keputusan politik, Syiah memiliki laskar yang terorganisasi secara baik, Hezbollah, sedangkan Sunni lebur dalam sistem ketentaraan negara,

sedangkan Kristen juga memiliki serdadu Phalangis. Kondisi terkini, banyak suara yang menginginkan sistim *power sharing* tersebut ditinjau ulang, karena komposisi penduduk mungkin tidak akan sama lagi seperti hasil sensus yang digunakan sebagai dasar kesepakatan tersebut.

Brunei Darussalam adalah negara monarki absolut, menerapkan hukum Islam, dalam perspektif akidah Asy'ariyah, berfikih Syafi'iyah. Kondisi penerapan hukum Islam yang monolitik seperti ini cukup memberikan kepastian hukum dan politik, pandangan keagamaan lain menjadi sulit bergerak terkunci oleh parameter mazhab yang dianut negara. Walhasil, gerakan transnasional pasti juga tidak akan bisa berkembang dengan baik di negara tersebut. Dalam perspektif pengambilan keputusan pemerintah tidak lagi membutuhkan kajian khusus untuk melarang kelompok yang dapat mengancam eksistensi pemerintahan dan bentuk negara untuk berkembang. Hizbut Tahrir tidak dapat berdiri dan beraktifitas disana, bahkan dakwah Islam yang cenderung puritanpun mengalami hambatan sangat keras dari pemerintah, lembaga keagamaan dan masyarakat yang ada.

Sebagai akhir dari penulisan buku ini, semoga apa yang telah dibahas dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan, terlebih lagi perumus kebijakan melalui sajian bahan yang argumentatif, empiris dan berdaya guna.

Pada era orde baru beberapa gerakan keagamaan yang beraktivitas secara sembunyi-sembunyi. Pada era reformasi, keran demokrasi seakan menjadi momentum bagi kelompok-kelompok keagamaan untuk tampil di hadapan publik memanifestasikan jatidirinya. Sebagian disebut gerakan keagamaan transnasional, misalnya, Al-Ikhwatul Muslimin (IM/gerakan tarbiyah), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Salafi, Syi'ah, Ahmadiyah (JAI) dan Jamaah Tabligh (JT). Jamhari dalam penelitian tahun 2012 menemukan fakta, yaitu telah terjadi penurunan tajam minat mahasiswa mengikuti organisasi ekstra

Gerakan paham keagamaan transnasional itu sebagian bermasalah dalam koridor sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia. Kehadirannya dipandang telah menabrak konvensi-konvensi kebangsaan mendelegitimasi Pancasila dan NKRI. Belakangan, terdapat ormas atau gerakan keagamaan itu kemudian diawasi secara ketat oleh pemerintah bahkan dibekukan organisasi tersebut. Buku ini mengupas tentang kelompok dan paham gerakan keagamaan tersebut dan perkembangannya di negara-negara yang menjadi lokus kajian tersebut.